BPP

BADAN PENGARAH PAPUA

LAPORAN KEGIATAN BPP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

BULAN AGUSTUS TAHUN 2026



TIM PENYUSUN

BP3OKP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN		
Pengarah	:	Hantor Matuan, S.IP.
Anggota Kelompok Kerja Papua Polhukam	:	Fransiscus Elosak,S.E.,M.M. Dafrin Muksin, S.IP., M.I.P. Namantus Gwijangge, S.IP.
Anggota Kelompok Kerja Papua Cerdas	:	Paul Wetipo,S.Pd Yaberius Kogoya, S.IP.
Anggota Kelompok Kerja Papua Sehat	:	Gaad Piranid Tabuni, SP.,M.M. Oliphina Rumbekwan, S.KM., M.Kes Nizmawati Abd Rahim, SKM., MKM.
Anggota Kelompok Kerja Papua Produktif	:	Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si Timmi Gurik,SH.,M.TH.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Meisly Mariana Kombong, S.AP. Asdiandri Kala' Patiung, S.Kom. Teo Aprianus Dini

DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA 1
TIM PENYUSUN 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Dasar Hukum 4
1.3 Ringkasan Kelembagaan 5
1.3.1 Definisi 5
1.3.2 Struktur Kelembagaan 6
1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan 6
1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja 7
BAB II PEMBAHASAN 8
2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan 8
2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan 20
2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si 33
2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Paul Wetipo, S,Pd) 48
2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Gaad Piranid Tabuni,SP.,M.M) 55
BAB III PENUTUP 72

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi khusus dilaksanakan dalam rangka tercapainya kesejahteraan rakyat, terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, penghormatan terhadap Hak Asasi khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Otonomi Khusus di Papua telah memasuki babak baru. Setelah berjalan 20 tahun, Pemerintah Pusat melanjutkan pemberian Otonomi Khusus bagi Papua dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam peraturan tersebut, diamanatkan pada Pasal 68A bahwa perlu dibentuk badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dalam rangka Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). Dalam menjalankan amanat tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua (BPP).

Sesuai dengan Perpres 121 Tahun 2022, BPP memiliki tugas utama dalam melaksanakan SHEK dalam pelaksanaan Otsus Papua. Badan tersebut diketuai oleh Wakil Presiden RI dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, serta satu orang Perwakilan OAP dari setiap Provinsi Papua DOB Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu dalam pelaksanaannya, akan dibantu pula oleh Sekretaris Eksekutif di Jakarta dan Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berlokasi di Papua, Kelompok Kerja, serta Kelompok Ahli. Badan yang baru dibentuk tersebut memiliki tantangan yang cukup berat, seperti kompleksitas koordinasi antara lembaga dan para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Otsus Papua, memastikan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh atau masyarakat Papua, dan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua serta menjembatani pemahaman di antara mereka dalam efektivitas komunikasi.

Arah percepatan pembangunan telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Rencana induk tersebut memuat berbagai target dengan capaian dan dampak yang terukur. Agar pelaksanaan tugas BPP dapat sejalan dengan rencana induk, perlu disusun Rencana Kegiatan dan Program Kerja BPP. Rencana kegiatan dan program kerja ini memuat Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum dan ringkasan kelembagaan, Bab II yang terdiri atas target outcome, rencana kegiatan dan program kerja, serta Bab III Penutup. Rencana kegiatan dan program kerja menjadi acuan bagi Badan Pengarah Papua, khususnya bagi Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas SHEK percepatan Pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Papua.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

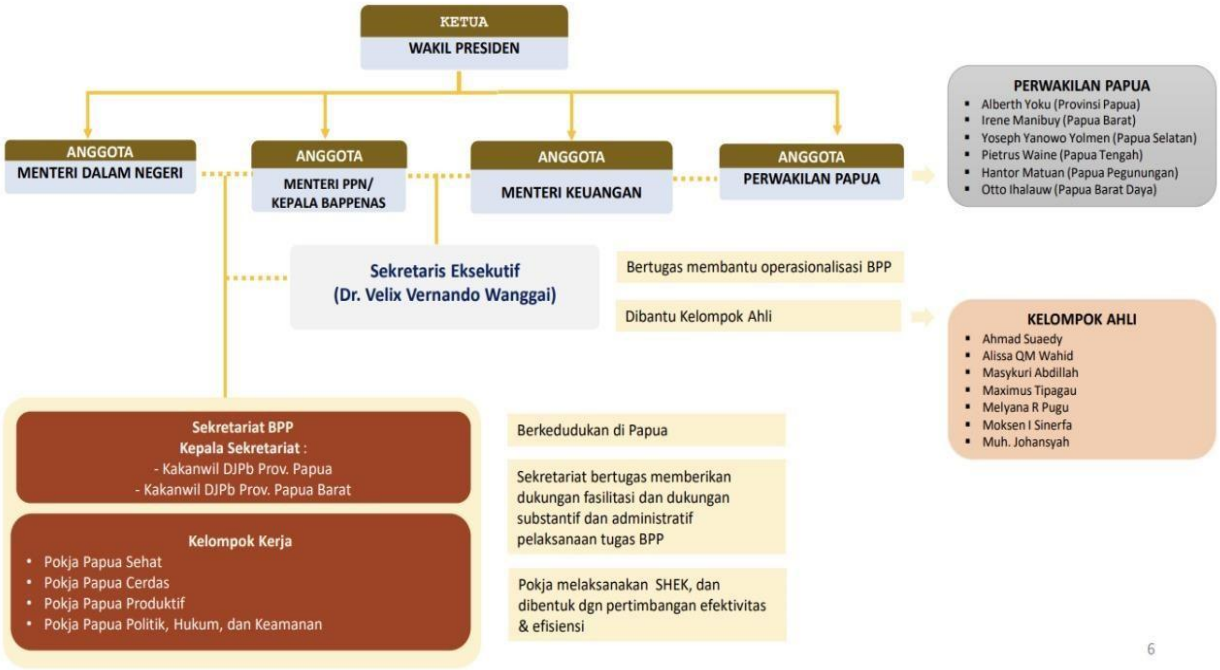
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
7. Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua;
8. Keputusan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keanggotaan, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Pembidangan Tugas Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
9. Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua;
10. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-3/SETBPP/JYP/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua.
11. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-1/SET/JYP/2025 tentang Penetapan Tim Dukungan Administratif dan Tim Dukungan Substantif Sekretariat Badan Pengarah Papua.

1.3 Ringkasan Kelembagaan

1.3.1 Definisi

1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.3.2 Struktur Kelembagaan



1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan

1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi :
   a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
   b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
   c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
   d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk

Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;

e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja

Dalam rangka melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dibentuk Kelompok Kerja pada Sekretariat Badan Pengarah Papua. Kelompok Kerja mempunyai tugas membantu Badan Pengarah Papua dalam:

a. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua; dan
b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lem.baga dan pemerintah daerah Provinsi Papua berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Kerja menyelenggarakan fungsi:

a. Konsultasi dan kordinasi dengan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing;
b. Koordinasi dan kerja sarna dengan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
d. Pengolahan dan pelaporan data serta informasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
e. Membantu Sekretariat Badan Pengarah Papua dalam komunikasi publik antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota" dengan masyarakat di Provinsi Papua;
f. Menyusun laporan kelompok kerja; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Badan Pengarah Papua.

BAB II
PEMBAHASAN

Kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada Bulan Agustus tahun 2026 antara lain:

2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan

Diwakili Bapak Gaad Piranid Tabuni,S.P.,M.M. (Pokja Papua Sehat)

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Rapat SHEK terhadap Rencana Kerja dan Pelaksanaan Pembangunan Otsus Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Waktu : Jumat, 07 Agustus 2026 Tempat : Ruang Kerja Sekretaris Dinkes Provinsi Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan dan Percepatan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Otsus Kesehatan Dinkes Prov. Papua Pegunungan tahn 2026
Peserta Kegiatan	:	1. Sugiarto Hutapea, M.H - Sekretaris Dinas Keshatan Gaad Piranid Tabuni - Atas Nama Anggota Pengarah BPP Prov.PP*) 1. Oliphina Rumbekwan, S.KM, M.Kes & Nizmawati Abd Rahim, M.Kes, M.KM 4 orang Kabid dan 6 orang Kasubid Dinas Kesehatan Provinsi PP
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	1. Sosialisasi Eksistensi dan Kelembagaan BP3OKP Prov Papua Pegunungan Melaksanakan Tugas dan Fungsi SHEK Anggota Pokja BP3OKP
Misi/Keterangan	:	- Membangun Kelancaran Koordinasi dan Komunikasi eksistensi kelembagaan BP3OKP dan Dinas Kesehatan. Sosialisasi Implementasi Tusi SHEK Pokja Papua Sehat dalam Perencanaan dan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Otsus Kesehatan
Hasil Kegiatan	:	1. SDM Kesehatan: Kebutuhan tenaga kesehatan berkompetensi di Dinas Kesehatan belum terpenuhi, sehingga kinerja belum optimal dan belum tersedia peta kebutuhan SDM kesehatan. 2. Dana Otsus Kesehatan: Tahun 2026 dialokasikan Rp60 miliar untuk pembangunan kesehatan dan pelayanan OAP. Namun, alokasi 20% dana Otsus untuk kesehatan masih terbatas serta pendataan OAP dalam SIAK belum mencapai 100%.

		3. Pembangunan RSUP Provinsi: Persiapan lahan dan *master plan* telah mencapai 90%, dengan sisa kajian IPAL dan AMDAL sebesar 10% yang masih memerlukan pembiayaan. 4. Data Penyakit Utama: Telah terdata 10 penyakit utama, namun data tersebut belum terintegrasi dengan RIPPP, RAPPP, K/L terkait, Provinsi, dan 8 kabupaten. 5. Data dan Pelaporan Kesehatan: Monev dan pelaporan telah dilakukan, namun belum tersedia pusat data digital yang terintegrasi antara Provinsi dan 8 kabupaten. 6. Sarana dan Prasarana: Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan masih terbatas akibat keterbatasan anggaran, serta belum ada pengajuan dukungan kepada Kementerian Kesehatan RI.
Rencana Tindaklanjut	:	1. SDM Kesehatan: Menyusun peta kebutuhan SDM dan mendorong program pendidikan tenaga kesehatan hingga dokter spesialis. 2. Dana Otsus: Mengoptimalkan penggunaan dana Rp60 miliar serta mempercepat perekaman data OAP melalui SIAK untuk mendukung peningkatan alokasi dana Otsus kesehatan. 3. RSUP Provinsi: Menyelesaikan sisa kajian IPAL dan AMDAL pada tahun 2026. 4. Data Penyakit: Mempercepat pendataan dan integrasi data penyakit utama dari 8 kabupaten. 5. Pusat Data: Mempercepat pembangunan sistem pusat data kesehatan digital yang terintegrasi. 6. Sarana dan Prasarana: Mendorong pengajuan dukungan Sarpras kepada Kementerian Kesehatan RI serta membangun koordinasi dengan PMU-SOPHI/IHSS.
Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Pelaksanaan rekerutamen dan Seleksi Mahasiswa Calon Pendidikan Kedokteran Sepsialis S2 OAP dari Provinsi Papua Pegunungan 2026.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Waktu : Dalam bulan Agustus 2026 Tempat : Kadinkes Provinsi dan 8 Kabupaten Provinsi Papua
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Percepatan rekrutmen SDM Dokter OAP yang terdaftar memenuhi syarat lulus kriteria menjadi Calon Mahasiswa Dokter Spesialis S2 berdasarkan Program Pembiayaan Setwapres.
Peserta Kegiatan	:	1. Sekretariat Wakil Presiden melalui Kepala Sekretariat BPP Prov. Papua 2. Anggota Pengarah BPP Provinsi Papua 3. Anggota BPP dan Pokja Papua Sehat BP3OKP Prov Papua Pegunungan 4. Kadinkes Prov Papua Pegunungan 5. Sekda dan Kadinkes 8 Kabupaten se Provinsi Papua Pegunugan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Percepatan Koordinasi dan Pengarahan informasi kepada Kepala Dinas Provinsi dan Bupati melalui Sekda cakupan 8 Kabuten di Prov. P.P
Misi/Keterangan	:	Melaksanakan tugas dan fungsi Koordinasi dan Komunikasi dalam percepatan proses pelaksanaan pendataan, kelengkapan berkas, kepastian jumlah calon pendaftar dengan dengan ketepatan batas dan plaporan.
Hasil Kegiatan	:	1. Menyerahkan Surat dan Blanko Pendaftaran serta penjelasan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Provinsi Papua Pegunungan dan dimintakan untuk dikomunikasin informasi pendafran kepada 8 Kadinkes Kabupaten. 2. Komunikasi dan informasikan langsung dengan Bupati, Sekda dan Kadinkes Kabupaten Lanny Jaya dan diharapkan percepatan pendataan. 3. Koordinasi dan komunikasi langsung dengan dr. Roni Oagay sebagai Koordinator tim ditunjuk Kadinkes Kabupaten Jayawijaya 4. Komunikasi langsung dengan individu personil dr.Uaga dari Kabupaten Yalimodan terkontak dan bersedia untuk mendaftar 5. Kadin Kesehatan Provinsi telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan 6 Kabupaten lainnya namun belum ada tanggapan /jawabannya

Rencana Tindaklanjut	:	Melanjutkan koordinasi dan komunikasi rekap pendataan calon mahasiswa Dokter Spesialis dengan Sekdinkes Provinsi, Dokter Roni Oagay dan Sekda Lannya Jaya
Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Sosialisasi Focus Group Discussion (FCD) I Penyusunan Dokumen Peta Potensi dan Profil Investasi Provinsi Papua Pegunungan cakupan 8 Kabupaten
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Waktu : Rabu Jumat 11 Agustus 2026 Tempat : Ruang Rapat Hotel Baliem Pilamo Wamena
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Sosialisasi Metode dan Teknik Penyusunan Dokumen Peta Potensi dan Profil Investasi Papua Pegunungan di Provinsi dan 8 Kabupaten
Peserta Kegiatan	:	1. Ketua Jurusan Ekonomi Uncen : DR. Agustina Baransana 2. Kadin Permodalan dan PTSP Provinsi PP DR. Suryani Yigibalom 3. Anggota DPR Provinsi 4. Anggota MRP dan Ketua LMA 5. Anggota Pokja BP3OKP 6. Forkompinda Provinsi dan Kabupaten Jayawijaya 7. Kepala OPD terkait dan Staf Propinsi dan 8 Kabupaten berjumah 50 orang
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Melaksanan Tusi SHEK Pokja BP3OKP terhadap Metode dan Teknik Penyusunan Dokumen Peta Potensi dan Profil Investasi Papua Pegunungan di Provinsi dan 8 Kabupaten
Misi/Keterangan	:	Menyampaikan periorits pemetaan Potensi dan dan investasi keumggulan berdasarkan potensi keunggulan daerah Papua Pegunungan Tanah, Hutan , dan air, Usaha ekonomi secara efektif dan efisien lestari.
Hasil Kegiatan	:	- Mengikuti materi teknik penyusunan dengan pemetaan, peta potensi dan Profil investasi, jenis Potensi sumberdaya.

		- Memberikan arahan prioritaskan pemetaan potensi dan profil investasi berbasis keunggulan potensi daerah. - Penetapan rundown tahapan kegiatan untuk tahun 2027.
Rencana Tindaklanjut	:	- Pemda 8 Kabupaten diarahkan segera menindaklanjuti ppemetaan potensi dan profil investasi Disepakati Kerjasama dan Koordinasi terus akan ditingkatkan. - Tahun 2027 akan menyusun peta pontesi dan profil investasi Provinsi Papua Pegunungan
Dokumentasi Kegiatan	:	   

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Kehadiran dan Kunjungan Pembukaan Pameran Hasil Pembangunan Setahun Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka menyongsong HUT RI ke 81
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Waktu : Selasa - Kamis, 12-13 Agustus 2026 Tempat : Halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Wamena
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Mensosialisasikan Hasil Percepatan Pembangunan dicapai di Provinsi Papua Pegunungan untuk diketahui Publik dan ikut merayakan peringatan HUT RI ke 81 tanggal 17 Agustus 2026.
Peserta Kegiatan	:	1. Semua OPD dan staf Pemerintah, PKK, GOW se-Prov. PP 2. Gaad P. Tabuni : Mewakili Anggota Pengarah dan Pokja Papua Sehat 3. Olipina Rumbekwan, S.KM, M.Kes : Anggota Pokja Papua Sehat 4. Nizmawati Abd Hakim, M.Kes, M.KM

Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Mengetahui data Khusus Pembangunan Kesehatan di Stand Dinas Kesehatan dan Dinas-Dinas lainnya mendampingi kunjungan Gubernur ke stand-stand pameran OPD
Misi/Keterangan	:	Melihat dan menilai data peningkatan pembangunan kesehatan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dan solusi mngatasinya
Hasil Kegiatan	:	- Mendampingi Gubernur kunjungan kepda stand-stand OPD Dinas - Kunjungn khusus kepada stand Pameran dinasKesehatan Provinsi membaca data pembangunan kesehatan dan penaganan penyakit - Chekup Kesehatan melalui pemeriksaan pribadi di stand
Rencana Tindaklanjut	:	- Diharapkan dengan saran agar Pameran Pembangunan dapat terus dilaksanakan setiap tahun demi evaluasi kemajuan pembangunan Provinsi Papua Pegunungan - Melalui Pameran dapat dievaluasi kemjuan pemanbgunan dan mengetahui persoalan yang dihadapi dan mendapat solusi
Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 5		
Nama Kegiatan	:	Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Otsus Papua Bersama PB3OKP Prrovinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Waktu : Selasa, 18 Agustus 2026 Tempat : Ruang Rapat Kantor BPP Provinsi Papua
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Otsus Papua Bersama PB3OKP Prrovinsi Papua Pegunungan Tahun 2026
Peserta Kegiatan	:	1. Drs Tinggal Wusono, M.AP. : Plt. Sekda Sekda Kabupaten Jayawijaya : 2. Ludya E.Logo, S.STP, M.Si : Kepala BAPPERIDA Kabupaten Jayawijaya

		3. Gaad PiranidTabuni SP.MM : Mewakili Anggota Pengarah BPP Prov PP 4. 6 orang Anggota Pokja BP3OKP Prov. Papua Pegunungan 5. Kepala OPD dan Staf di Lingkungan Pemda Kab. Jayawijaya : 30 orang
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Pelaksanakan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Otsus Kabupaten Jayawijaya bersama BP3OKP dalam tugas dan fungsi Sinkonisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi tahun 2026.
Misi/Keterangan	:	- Sosialisasikan Eksistensi Kelembagaan dan Tusi SHEK anggota Pengarah dan dan Pokja BP3OKP di 6 Tanah Papua Raya - Koordinasi dan Evaluasi jabaran pembangunan Otsus dalam aspek perencanaan, penjabaran dana serta aksi percepatan pelaksanaan kegiatan di kabupaten Jayawijaya tahun 2026
Hasil Kegiatan	:	Terlaksana sosialisasi dan koordinasi : 1. Aspresiasi pertemuan Rapat Koordinasi, Penyampaian garis besar kebijakan dan sasaran pembangunan Otsus dan penjabaran serta pelaksanannya di Kabupaten dan di 40 Distrik serta 4 kelurahan 328 Kampung oleh Plt Sekda 2. Penyampaian Rincian Perencanaan, Penjabaran serta Pelaksanaan Pembangunan Otsus : a. Menginisiasi Pertama kali terlaksananya Forum Rapat Koordinasi BP3OKP bersama Pemda Jayawijaya b. Menyampaikan rincian jabaran Program 5 tahun dan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Otsus di Kabupaten Jayawijaya tahun 2026 dalam laporan Narasi, angka dan data (seperti data halaman berikut) c. Menyampaika tantangan, kendala dan masalah yang dihadapi demi bersama BP3OKP mencari solusi percepatan pembangunan ke depan 3. Penyampaian Eksistensi Kelembagaan, Dasar Hukum, Tugas dan Fungsi, Personil BP3OKP 6 Provinsi Papua Raya inklusif Provinsi Papua Pegunungan, dengan memperkenalkan Personil Anggota Pengarah, 10 Anggota Pokja BP3OKP Prov Papua Pegunungan sambil mengheningkan cipta mengenang jasa Almarhum Hanthor Matuan sebagai pelopor utama BP3OKP di Prov PP. 4. Diskusi dan Tanya jawab Pemaateri dengan peserta rapat , di akhiri jamuan makan oleh Bapperida

Rencana Tindaklanjut	:	BP3OKP melanjutkan SHEK di Pemda dan implementasi pembangunan OTSUS di Distrik dan Lurah/kampung
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 6		
Nama Kegiatan	:	Kunjungan Kerja SHEK Anggota Pokja Papua Sehat terhadap Penyelenggaraan dan Perkembangan Pendidikan SMK Kesehatan Elisa Gobai Wamena
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	• Hari/Tanggal: Jumat, 21 Agustus 2026 • Tempat: Ruang Kelas SMK Kesehatan Elisa Gobai Wamena
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi terkait eksistensi kelembagaan, visi, misi, tujuan, dan pengembangan SMK Kesehatan Elisa Gobai. • Mengetahui penyelenggaraan pendidikan, khususnya terkait kurikulum, SDM guru, dan peserta didik. • Mengidentifikasi kondisi, perkembangan, serta kendala dalam penyelenggaraan pendidikan.
Peserta Kegiatan	:	Pihak SMK Kesehatan Elisa Gobai: • Yance Gobai, selaku Kepala Sekolah/Pengelola SMK. • 6 orang guru dan tenaga administrasi sekolah. • 10 orang perwakilan siswa.

		Anggota Pokja Papua Sehat BP3OKP: • Gaad P. Tabuni, S.P., M.M., mewakili Anggota Pengarah BPP sekaligus Anggota Pokja. • Olipina Rumbekwan, S.KM., M.Kes. • Nizmati Abd Rahim, S.KM., M.KM.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	
Hasil Kegiatan	:	• Terlaksana rapat koordinasi dan diskusi bersama Kepala Sekolah, guru, tenaga administrasi, dan perwakilan siswa. • Dilaksanakan pengarahan mengenai etika, karakter, takut Tuhan, dan integritas diri siswa. • Dilaksanakan sosialisasi dan pengarahan terkait pencegahan penyakit menular bagi siswa. • Diterima dokumen tertulis mengenai sejarah pendirian dan perkembangan SMK Kesehatan, meliputi latar belakang, visi dan misi, tujuan, sasaran, pengembangan SDM guru dan siswa, dukungan masyarakat, serta kendala yang dihadapi. • Disampaikan penjelasan mengenai eksistensi, tugas, dan fungsi BP3OKP serta pentingnya koordinasi dan komunikasi dengan Yayasan Sinar Kasih dan pihak sekolah.
Rencana Tindaklanjut	:	• Meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara berkelanjutan antara Anggota Pokja BP3OKP dengan Manajemen Yayasan Sinar Kasih dan SMK Kesehatan Elisa Gobai. • Melanjutkan kerja sama dan komunikasi yang telah terjalin selama hampir 2 tahun untuk mendukung pengembangan pendidikan kesehatan di Wamena.

Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 7		
Nama Kegiatan	:	Rapat Evaluasi Hasil Kinerja dan Komitmen Rencana Kerja Internal Anggota Pokja BP3OKP Bulan Agustus dan Rencana Kerja September 2026 (Akhir Triwulan III)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	• Hari/Tanggal: Rabu, 19 Agustus 2026 • Tempat: Ruang Rapat Kantor BPP BP3OKP Wamena
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	• Mengevaluasi hasil kinerja Anggota Pokja selama bulan Agustus 2026. • Membahas permasalahan dan menyepakati solusi yang diperlukan. • Menetapkan rencana kerja bulan September 2026 sebagai akhir Triwulan III.
Peserta Kegiatan	:	• 9 Anggota Pokja BP3OKP dan Admin BPP. • Perwakilan dari 4 Pokja BP3OKP.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	BPP Provinsi Papua Pegunungan
Hasil Kegiatan	:	Hasil Kegiatan • Terlaksana evaluasi kinerja dan disepakati rencana kerja bulan September 2026. • Dilakukan pembahasan permasalahan serta penyepakatan solusi alternatif.

		• Dibahas perlunya perbaikan kondisi dan kelancaran kerja kantor. • Ditekankan kembali komitmen terhadap 3 indikator kinerja utama (IKU) setiap Anggota Pokja. • Anggota Pokja diwajibkan membuat laporan kerja pada minggu pertama setiap bulan. • Hal-hal khusus yang memerlukan penanganan lebih lanjut diteruskan kepada Sekretariat BPP. • Dibahas rencana penyusunan proposal kunjungan kerja bersama Anggota Pokja ke Kabupaten Mamberamo Tengah.
Rencana Tindaklanjut	:	• Rapat evaluasi kinerja dilaksanakan secara rutin pada setiap akhir bulan. • Meningkatkan kedisiplinan dalam absensi, pelaporan, dan publikasi kegiatan sebagai bagian dari budaya kerja Anggota Pokja. • Menindaklanjuti rencana kerja September 2026 sesuai hasil kesepakatan. • Menyusun proposal dan mempersiapkan pelaksanaan kunjungan kerja ke Kabupaten Mamberamo Tengah.
Dokumentasi Kegiatan	:	

2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan

Fransiscus Elosak, S.E.,M.M., Dafrin Muksin,S.IP., M.I.P., Namantus Gwijangge,S.IP.

1. Kegiatan Pokja Papua Polhukam

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Menghadiri Undangan Pembukaan Pelaksanaan PKKMB Tahun 2026 UNAIM Yapis Wamena
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2026 bertempat di UNAIM Yapis Wamena
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Mendukung pelaksanaan PKKMB serta memperkuat sinergi dan komunikasi antara Pokja Papua Polhukam dengan UNAIM Yapis Wamena dalam bidang pendidikan, pembinaan generasi muda, dan penciptaan lingkungan akademik yang aman, tertib, dan kondusif.
Peserta Kegiatan	:	Pokja Papua Polhukam (**Namantus Gwijangge, S.iP da Dafrin Muksin, S.IP., M.I.P**), Pokja Papu Cerdas, Pimpinan Universitas, Dosen, tenaga kependidikan, panitia, mahasiswa baru, dan undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Menghadiri dan mengikuti pembukaan PKKMB, melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak universitas, serta memberikan dukungan terhadap kegiatan pembinaan mahasiswa baru dalam rangka membangun generasi muda yang berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan mendukung Papua Damai.
Misi/Keterangan	:	Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Pokja Papua Polhukam terhadap penguatan pendidikan dan pembinaan generasi muda di Papua Pegunungan. Kehadiran Pokja juga menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara perguruan tinggi dan stakeholder dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, damai, dan kondusif.
Hasil Kegiatan	:	Terjalinnya koordinasi dan komunikasi antara Pokja Papua Polhukam dengan UNAIM Yapis Wamena dalam mendukung terciptanya lingkungan kampus yang aman, tertib, dan kondusif.Kegiatan juga memperkuat sinergi dalam pembinaan mahasiswa, khususnya dalam menjaga persatuan, stabilitas sosial, serta mendukung upaya mewujudkan Papua Pegunungan yang damai.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	• Meningkatkan koordinasi antara Pokja Papua Polhukam dan UNAIM Yapis Wamena. • Mendorong kegiatan edukasi mengenai wawasan kebangsaan, toleransi, persatuan, dan Papua Damai. • Membangun ruang komunikasi dengan mahasiswa terkait isu sosial, keamanan, dan perdamaian. • Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan yang mendukung terciptanya situasi sosial yang aman dan kondusif di Papua Pegunungan.

Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Pasca Kejadian di FBLB Walesi, Mendorong Kolaborasi dan Penguatan Kebijakan Penanganan Konflik Sosial
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2026, bertempat di Ruang Wakapolres Jayawijaya, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Melakukan koordinasi pascakejadian di sekitar FBLB Walesi, memperoleh informasi mengenai perkembangan situasi keamanan, serta mendorong kolaborasi dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial di Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	Pokja Polhukam BPP Papua Pegunungan (**Frans Elosak, SE., MM.; Namantus Gwijangge, S.iP.; Dafrin Muksin, S.IP., M.I.P) Yaberius Kogoya, S.IP.** dari Pokja Papua Sehat sekaligus tokoh Kabupaten Lanny Jaya; Kompol Albertus Mabel, SIK., MAP. selaku Wakapolres Jayawijaya; dan AKP Edi Tohir Sabara selaku Kabag Ops Polres Jayawijaya.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan pertukaran informasi terkait perkembangan situasi keamanan pascakejadian serta mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan dan penanganan konflik sosial secara kolaboratif.
Misi/Keterangan	:	Kegiatan merupakan bagian dari tugas Pokja Papua Polhukam dalam melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap dinamika politik, hukum, keamanan, dan konflik sosial serta mendorong penguatan kebijakan dan kolaborasi dalam rangka menjaga stabilitas dan perdamaian di Papua Pegunungan.
Hasil Kegiatan	:	Terjalinnya koordinasi antara BPP Pokja Polhukam, Pokja Papua Sehat, dan Polres Jayawijaya terkait kondisi keamanan pascakejadian di FBLB Walesi. Pertemuan juga memperkuat kesepahaman mengenai pentingnya deteksi dini, pencegahan konflik, komunikasi lintas sektor, serta pendekatan sosial dan budaya dalam menangani konflik sosial.

Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	Perlu memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam melakukan deteksi dini serta pencegahan konflik. Selain itu, perlu didorong penguatan kebijakan penanganan konflik sosial yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, adat, dan kondisi masyarakat Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Dengan Biro Hukum Provinsi Papua Pegunungan Pada Kegiatan Pameran Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan dilaksanakan pada 16 Agustus 2026, bertempat di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Gedung Otonomo, Wamena.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Biro Hukum Provinsi Papua Pegunungan terkait dukungan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam upaya penguatan kebijakan penyelesaian konflik sosial di Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	Biro Hukum Provinsi Papua Pegunungan, unsur Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, anggota Pokja Papua Polhukam BPP Provinsi Papua Pegunungan (**Dafrin Muksin, S.IP., M.I.P dan Namantus Gwijangge S.iP)**, serta peserta kegiatan Pameran Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Pokja Papua Polhukam melaksanakan koordinasi dan menyampaikan masukan kepada Biro Hukum terkait pentingnya percepatan penyusunan dan penetapan Perdasus tentang Penyelesaian Konflik Sosial sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk memperkuat pencegahan dan penyelesaian konflik di Papua Pegunungan.
Misi/Keterangan	:	Koordinasi diarahkan untuk mendorong tersedianya landasan hukum yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat Papua Pegunungan dalam penanganan konflik sosial serta mendukung terwujudnya Papua Damai.

Hasil Kegiatan	:	Terjalin komunikasi dan koordinasi antara Pokja Papua Polhukam dengan Biro Hukum Provinsi Papua Pegunungan. Pokja menyampaikan pentingnya percepatan **Perdasus Penyelesaian Konflik Sosial** sebagai instrumen hukum dalam memperkuat mekanisme pencegahan, penanganan, dan penyelesaian konflik secara damai, partisipatif, dan berkeadilan.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	• Mendorong percepatan proses penyusunan Perdasus Penyelesaian Konflik Sosial. • Memperkuat koordinasi Pokja Papua Polhukam dengan Biro Hukum dan perangkat daerah terkait. • Mendorong pelibatan tokoh adat, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi. • Melakukan pemantauan terhadap perkembangan penyusunan Perdasus sebagai bagian dari agenda Papua Damai.
Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Dengan Bagian Pemerintahan dan Bagian Otonomi Khusus Provinsi Papua Pegunungan Pada Kegiatan Pameran Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan dilaksanakan pada 16 Agustus 2026, bertempat di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Gedung Otonomo, Wamena.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Bagian Pemerintahan dan Bagian Otonomi Khusus terkait pelaksanaan program pemerintahan dan Otsus, serta memperoleh informasi mengenai capaian kinerja Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang ditampilkan dalam kegiatan pameran.
Peserta Kegiatan	:	Bagian Pemerintahan, Bagian Otonomi Khusus Provinsi Papua Pegunungan, unsur perangkat daerah, anggota Pokja Papua Polhukam BPP Provinsi Papua Pegunungan (**Dafrin Muksin, S.IP., M.I.P dan Namantus Gwijangge S.iP)**, serta peserta dan pengunjung kegiatan Pameran Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Melaksanakan koordinasi, komunikasi, dan pengumpulan informasi terkait program serta capaian kinerja pemerintah daerah, khususnya pada bidang pemerintahan dan

		pelaksanaan Otonomi Khusus. Kegiatan juga menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara BPP dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Misi/Keterangan	:	Kegiatan diarahkan untuk mendukung penguatan koordinasi kelembagaan dan memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan Otsus serta capaian pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan.
Hasil Kegiatan	:	Terjalin komunikasi dan koordinasi dengan Bagian Pemerintahan dan Bagian Otonomi Khusus Provinsi Papua Pegunungan. Diperoleh informasi mengenai berbagai program dan capaian kinerja pemerintah daerah yang ditampilkan dalam pameran, serta terbuka ruang koordinasi untuk mendukung pelaksanaan tugas Pokja Polhukam BPP Provinsi Papua Pegunungan ke depan.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	• Memperkuat koordinasi BPP dengan Bagian Pemerintahan dan Bagian Otonomi Khusus. • Melakukan komunikasi lanjutan terkait data dan informasi pelaksanaan Otsus. • Mendorong sinergi dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otsus di Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 5		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Otonomi Khusus (OTSUS) di Kabupaten Jayawijaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan dilaksanakan pada 18 Agustus 2026, bertempat di Gedung Pertemuan Wio, Kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dan diskusi bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Otonomi Khusus di Kabupaten Jayawij
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Kegiatan bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, BPP Provinsi Papua Pegunungan, Forkopimda, OPD, organisasi masyarakat, pemuda, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan Otsus. Selain itu, kegiatan bertujuan memastikan agar implementasi Otsus memperhatikan aspek kesejahteraan, keamanan, stabilitas sosial, perlindungan masyarakat, partisipasi OAP, serta pembangunan Papua yang damai.

Peserta Kegiatan	:	Bupati Kabupaten Jayawijaya yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, Kepala Baperinda, unsur Forkopimda, para Kepala OPD dan staf, LSM, KNPI, serta seluruh anggota Pokja BPP Provinsi Papua Pegunungan.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Pokja Papua Polhukam melaksanakan fungsi koordinasi, komunikasi, dan penyampaian masukan strategis terkait aspek politik, hukum, keamanan, dan perdamaian dalam pelaksanaan Otsus.
Misi/Keterangan	:	Kegiatan diarahkan untuk mendukung terwujudnya Papua Pegunungan yang aman, damai, sejahtera, dan bermartabat melalui pelaksanaan Otsus yang partisipatif, inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap kondisi sosial serta budaya masyarakat. Pokja Papua Polhukam menyampaikan bahwa agenda Papua Damai perlu menjadi bagian penting dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Otsus.
Hasil Kegiatan	:	Kegiatan menghasilkan penguatan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, BPP Provinsi Papua Pegunungan, Forkopimda, OPD, LSM, KNPI, dan pemangku kepentingan lainnya. Terbangun pemahaman bersama bahwa pelaksanaan Otsus perlu dilaksanakan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek pembangunan, kesejahteraan, keamanan, keadilan sosial, budaya, dan perdamaian. Pokja Papua Polhukam juga mendorong adanya pendekatan pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian dalam pelaksanaan program Otsus di Kabupaten Jayawijaya.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	• Memperkuat koordinasi antara BPP Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam mengawal pelaksanaan Otsus. • Mengintegrasikan perspektif Papua Damai dan pencegahan konflik dalam perencanaan program Otsus. • Meningkatkan pelibatan OAP, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, LSM, dan kelompok masyarakat lainnya dalam proses pembangunan. • Mendorong koordinasi lintas sektor dalam mengidentifikasi dan mencegah potensi konflik sosial. • Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Otsus agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. • Menindaklanjuti hasil koordinasi melalui kegiatan konsultasi, asistensi, monitoring, dan koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan pemangku kepentingan terkait.

Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 6		
Nama Kegiatan	:	Melaksanakan Diskusi Publik Papua Polhukam di UNAIM Yapis Wamena
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2026, bertempat di Gedung Paecasarjna, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena (UNAIM Yapis Wamena).
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Menyerap aspirasi, gagasan, pandangan mahasiswa dan masyarakat terkait berbagai isu pembangunan. Membahas isu Otonomi Khusus, persatuan, kondisi sosial, politik, hukum dan keamanan. Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II. Membangun kolaborasi antar berbagai elemen masyarakat untuk mewujudkan Papua Pegunungan yang damai, maju dan sejahtera.
Peserta Kegiatan	:	Rektor UNAIM Yapis Wamena Dr. H. Rudihartono Ismail, M.Pd., CRA., CRP; Perwakilan Pokja Polhukam BPP Provinsi Papua Pegunungan: **Frans Elosak, SE., MM.; Dafrin Muksin, S.IP., M.I.P.; Namantus Gwijangge, S.iP**. Narasumber: Yefta Lengka (Sekretaris Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia), Ahmad Rizali Pawane, S.Sos., M.I.P. dan Mahasiswa UNAIM Yapis Wamena
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	• Menjadi ruang dialog terbuka untuk menyerap aspirasi, kritik, masukan dan harapan masyarakat. • Menjadi sarana penyampaian informasi sekaligus menerima masukan dua arah terkait pelaksanaan Otsus. • Mengumpulkan bahan evaluasi dan penyusunan rekomendasi guna memperkuat implementasi Otsus Jilid II. • Membangun komunikasi dan kerja sama antar pemerintah, perguruan tinggi, mahasiswa, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat dan elemen lainnya.
Misi/Keterangan	:	Mewujudkan Papua Pegunungan yang damai, bersatu, aman, tertib, maju dan sejahtera melalui dialog yang berkelanjutan, inklusif dan konstruktif. Penguatan Otsus membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar pelaksanaannya sesuai kebutuhan dan harapan, khususnya Orang Asli Papua.

Hasil Kegiatan	:	• Kegiatan diskusi publik ini telah berhasil membuka ruang dialog yang konstruktif serta pertukaran pandangan secara terbuka terkait pelaksanaan Otonomi Khusus, serta berbagai kondisi sosial, politik, hukum dan keamanan yang berkembang di Papua Pegunungan. Melalui forum tersebut, aspirasi dan beragam masukan dari kalangan mahasiswa dapat terserap dengan baik, termasuk di antaranya harapan agar kegiatan-kegiatan selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan agar ruang partisipasi menjadi semakin luas. • Pihak Pokja Polhukam secara terbuka menerima dan menghargai seluruh pandangan serta masukan yang disampaikan, termasuk adanya perbedaan pendapat, dan menempatkannya sebagai bahan evaluasi sekaligus bagian penting dari proses pengawasan terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus. Seluruh pandangan, gagasan dan aspirasi yang disampaikan dalam forum ini selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan penyusunan rekomendasi guna memperkuat dan menyempurnakan implementasi Otonomi Khusus Jilid II agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	• Memperluas ruang partisipasi dan membuka ruang diskusi publik dengan melibatkan lebih banyak organisasi mahasiswa dan kepemudaan agar lebih inklusif. • Menjadikan keseluruhan aspirasi dan masukan yang Menjadikan seluruh aspirasi dan masukan sebagai bahan evaluasi guna menyempurnakan penyelenggaraan kegiatan selanjutnya. • Memanfaatkan hasil diskusi sebagai bahan rekomendasi agar pelaksanaan Otsus Jilid II semakin tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. • Melakukan sosialisasi secara menyeluruh mengenai tugas, peran dan fungsi Badan Pengarah Papua (BPP) kepada berbagai elemen masyarakat. • Membangun komunikasi dan kerja sama antar seluruh elemen masyarakat guna menjaga persatuan, stabilitas dan kemajuan bersama.

Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 7		
Nama Kegiatan	:	Menghadiri Kegiatan FGD Partisipatif Bersama Organisasi Masyarakat Sipil: “Transformasi Sistem Pangan dan Strategi Resiliensi Masyarakat Hubula di Lembah Baliem”
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan dilaksanakan pada 24 Agustus 2026 bertempat di Rumah Retret Silimo Siloam Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan merupakan bagian dari rangkaian pengumpulan data penelitian yang dilaksanakan oleh Papua Democratic Institute (PD-Institute).
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	FGD bertujuan memperoleh informasi dan perspektif dari berbagai aktor lokal mengenai perubahan sistem pangan, pertanian, mata pencaharian, serta strategi resiliensi masyarakat adat Hubula. Secara substantif, forum juga menjadi ruang untuk membahas faktor sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, dan kebijakan yang memengaruhi keberlanjutan kehidupan masyarakat adat. Penelitian sendiri diarahkan untuk mendokumentasikan pengetahuan dan praktik pertanian masyarakat Hubula serta mengidentifikasi sumber kerentanan dan resiliensi masyarakat.
Peserta Kegiatan	:	Peserta berasal dari unsur organisasi masyarakat sipil, kelembagaan adat, gereja, perguruan tinggi, sekolah adat, dan tokoh masyarakat. Dalam kegiatan ini turut berpartisipasi **Dafrin Muksin, S.IP., M.I.P.** sebagai peserta dari Pokja Papua Polhukam. Peserta lainnya antara lain Yayasan Bina Adat Welesi, Yayasan Humi Inane, STIPER Petra Baliem Wamena, Jaringan Perempuan Adat, Sekolah Adat Walelagama dan Yogonima, unsur Gereja Katolik, Kingmi dan Baptis, Paroki Pikhe, Paroki Kurulu, Stasi Watlangku, Dewan Adat Hubula, Ketua DAP Bapak Dominikus Surabut, tokoh adat dari Hubikosi, Kurulu dan Wadangku, Hubula Humi, STKIP Abdi Wacana Wamena, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, serta Universitas Baliem Papua
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	memberikan perspektif terkait aspek sosial-politik, pemerintahan, keamanan, dan potensi konflik yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat.
Misi/Keterangan	:	Partisipasi Pokja Papua Polhukam dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat perspektif

		kebijakan dalam memahami persoalan masyarakat adat Hubula. Pokja Papua Polhukam mendorong perlindungan terhadap tanah adat masyarakat sebagai salah satu basis penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat adat. Tanah adat memiliki hubungan erat dengan pertanian tradisional, sumber pangan, mata pencaharian, identitas budaya, serta hubungan sosial masyarakat. Karena itu, persoalan tanah perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan agar tidak menjadi sumber kerentanan dan potensi konflik sosial.
Hasil Kegiatan	:	FGD memperlihatkan bahwa transformasi sistem pangan masyarakat Hubula berkaitan erat dengan perubahan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan tata kelola sumber daya. Forum juga mengidentifikasi pentingnya pengetahuan lokal dan praktik pertanian masyarakat adat sebagai sumber resiliensi. Dalam konteks tersebut, Pokja Papua Polhukam menekankan pentingnya perlindungan tanah adat masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga sumber penghidupan, ketahanan pangan, identitas budaya, dan stabilitas sosial. Perlindungan tanah adat juga dipandang penting sebagai langkah pencegahan terhadap munculnya sengketa atau konflik yang dapat terjadi akibat ketidakjelasan penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah. Hasil FGD selanjutnya dapat menjadi bahan pengayaan penelitian dan masukan dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	• Mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian terhadap perlindungan dan keberlanjutan tanah adat masyarakat Hubula dalam kebijakan pembangunan. • Memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, kelembagaan adat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan Pokja Papua Polhukam dalam menangani persoalan masyarakat adat. • Mendorong program pembangunan dan ketahanan pangan memperhatikan pengetahuan lokal serta hak dan kepentingan masyarakat adat.

Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 8		
Nama Kegiatan	:	Menghadiri Kegiatan Konsultasi Publik: Rancangan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Pegunungan Tentang Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Masyarakat Hukum Adat Hubula di Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan dilaksanakan pada 26 Agustus 2026 bertempat di Rumah Retret Silimo Siloam Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan merupakan bagian dari rangkaian pengumpulan data penelitian yang dilaksanakan oleh Papua Democratic Institute (PD-Institute).
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Menghimpun masukan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk penyempurnaan Raperdasus serta memastikan perlindungan sistem pertanian, hak masyarakat adat, kearifan lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Hubula.
Peserta Kegiatan	:	Pokja Papua Polhukan BPP Papua Pengununag, **Dafrin Muksin, S.IP., M.I.P**, BAPPERIDA, DPRD, MRP, Dinas Teknis, ATR/BPN, KPH, Perwaiklan Perguruan Tinggi & Sekolah Adat, Gereja Katolik, Kingmi, Baptis serta Paroki/Stasi setempat, Dewan Adat, Yayasan, Jaringan Perempuan Adat, Tokoh Adat. Pokja Papua Polhukan: Dafrin
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Mengikuti konsultasi publik, mencermati substansi Raperdasus, menyerap aspirasi masyarakat, serta memberikan masukan terkait perlindungan tanah adat, sistem pertanian lokal, ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
Misi/Keterangan	:	Mendukung kebijakan pembangunan pertanian yang berbasis kearifan lokal, perlindungan masyarakat hukum adat, ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hasil Kegiatan	:	Diperoleh berbagai masukan mengenai perlindungan sistem pertanian Hubula, hak atas tanah adat, penguatan kelembagaan adat, integrasi kearifan lokal dengan teknologi, peningkatan produktivitas dan nilai ekonomi hasil pertanian, serta pelibatan masyarakat dalam pembangunan.

Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	Penyempurnaan Raperdasus berdasarkan aspirasi masyarakat; pemetaan sistem pertanian dan potensi lokal; penguatan kelembagaan adat dan kelompok tani; pengembangan teknologi yang sesuai dengan kearifan lokal; serta penyusunan program implementasi dan monitoring setelah regulasi ditetapkan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 9		
Nama Kegiatan	:	Menghadiri Kegiatan Rapat Pimpinan Gereja Kemah Injil di Tanah Papua
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan dilaksanakan pada 24-28 Agustus di STT Walter Post Jayapura Papua
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Mempersiapkan pelaksanaan Konferensi Sinode KINGMI di Tanah Papua pada November 2026 di Manokwari, melalui pembahasan dan penetapan berbagai ketentuan organisasi serta agenda strategis gereja.
Peserta Kegiatan	:	Pokja Papua Polhukam, **Namantus Gwijangge, S.iP,** Ketua Sinode, Ketua Tim Seleksi, dan Anggota.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Mengikuti rapat pimpinan, memberikan perhatian terhadap pembahasan persyaratan bakal calon pengurus baru, proses penjaringan dan sosialisasi sistem pencalonan serta mekanisme pemilihan, sekaligus mengikuti pembahasan situasi konflik di Papua dan peran gereja dalam penanganannya.
Misi/Keterangan	:	Rapat menjadi forum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi, memastikan proses regenerasi dan pemilihan pengurus berlangsung transparan dan sesuai ketentuan gereja, serta memperkuat peran gereja dalam perdamaian, rekonsiliasi, dan penanganan konflik di Papua.
Hasil Kegiatan	:	Rapat Pimpinan KINGMI di Tanah Papua menghasilkan kesepakatan mengenai persyaratan bakal calon pengurus baru serta mekanisme penjaringan, sosialisasi, pencalonan, dan pemilihan pengurus. Rapat juga membahas situasi konflik di Papua dan pentingnya peran gereja dalam mendorong pendekatan damai, dialog, rekonsiliasi, dan penyelesaian konflik. Seluruh hasil pembahasan menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan Konferensi Sinode KINGMI di Tanah Papua pada November 2026 di Manokwari.

Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	Menindaklanjuti hasil keputusan rapat, melakukan sosialisasi mekanisme pencalonan dan pemilihan kepada seluruh unsur terkait, mempersiapkan administrasi dan tahapan Konferensi Sinode, serta memperkuat peran gereja dalam dialog, mediasi, rekonsiliasi, dan pembangunan perdamaian di Tanah Papua.
Dokumentasi Kegiatan	:	

2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Yoyo Iwik Sriyoto,S.Sos.,M.Si, Timmi Gurik

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	**:**	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya di Kabupaten Jayawijaya.
Pelaksanaan Kegiatan **(Waktu & Lokasi)**	**:**	Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2026 di Gedung Pertemuan Wio Kantor Bupati Jayawijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	**:**	Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut : a. Untuk mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan dana otsus di bidang ekonomi, infrastruktur, rumah khsusus dan energi. b. Untuk menjalankan program strategis yang sudah disusun dan dianggarkan oleh masing-masing OPD. c. Untuk menciptakan peluang lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberi kesempatan bagi para pelaku usaha kontraktor, UMKM dan EKRAF OAP Kab. Jayawijaya. d. Untuk membantu mensukseskan program masing-masing OPD, MBG dan pembentukan koperasi merah putih/KMP di Kab. Jayawijaya.
Peserta Kegiatan	**:**	Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu : 1. Bupati (Diwakili Sekda Kab. Jayawijaya) 2. Ka. Baperinda 3. Forkopimda/Kepala OPD & Staff 4. LSM 5. KNPI 6. Anggota BP3OKP
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	**:**	1. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan antara pimpinan OPD, para Kabid dan pelaku usaha UMKM dan EKRAF agar bisa berkolaborasi untuk ikut terlibat dan

		mensukseskan program yang sudah disusun para OPD, program nasional MBG dan KMP di Kab. Jayawijaya. 2. Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi pelaku usaha UMKM/EKRAF pertanian dan sembako.
Misi/Keterangan	**:**	➢ Penyaluran dana otsus harus tepat sasaran, transparan dan akuntabel. ➢ Masing-masing OPD yang masuk program Papua produktif harus mengajukan program kerja. ➢ Hindari penyalahgunaan dana otsus.
Hasil Kegiatan	**:**	Hasil kegiatan pelaksanaan kegiatan ini Adalah mendorong dan koordinasi agar kedepan para pelaku usaha kontraktor lokal, pelaku usaha pertanian dalam hal ini kelompok tani sayur, ikan, ternak dan sembako agar langsung bisa mensuplai hasil panennya ke koperasi KMP dan dapur SPPG - MBG dengan jumlah, jenis dan kualitas yang telah ditetapkan..
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	**:**	Program kerja yang sudah disusun masing-masing OPD, program nasional MBG, koperasi KMP AKSN dilaksanakan dengan kerjasama, dikoordinasikan, dilaporkan dan dievaluasi kepada pemerintah daerah agar kerjasama dengan pemerintah, pimpinan OPD, ketua satgas BGN dan pelaku usaha bisa berjalan dengan baik mulai dari kampung, distrik dan kabupaten.
Dokumentasi Kegiatan	**:**	 

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	**:**	Pendampingan Pelaku Usaha UMKM, EKRAF, Seniman dan Model di Acara Noken Streat, Fashion, Pameran UMKM dan Kopi Wamena Kabupaten Jayawijaya Tahun 2026.

Pelaksanaan Kegiatan **(Waktu & Lokasi)**	**:**	Kegiatan ini dilaksanakan di Depan Kantor Bupati – Wilayah Tugu Salib Wamena pada tanggal 07 S/d 10 Agustus 2026.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	**:**	1. Untuk mempromosikan hasil produk-produk kearifan lokal daerah Provinsi Paua Pegunungan ke Kancah Nasional. 2. Untuk membantu para pelaku usaha EKRAF OAP agar hasil produknya bisa menembus pasar dan bisa bersaing di pasar nasional. 3. Untuk menciptakan dan melatih daya saing bagi para pelaku EKRAF OAP serta meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memberi kesempatan bagi para pelaku usaha RKRAF OAP untuk bekerjasama internal dan eksternal dari hasil produk usahanya. 4. Bekerjasama dan menjalin hubungan bisnis dengan Daerah/Provinsi lain untuk barter hasil komuditi yang dibutuhkan dari masing-masing Daerah/Provinsi.
Peserta Kegiatan	**:**	Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu 1. Dinas Koperasi & UMKM 2. Anggota Dekrasnada 3. Dinas Parekraf 4. Pejabat Dinas Parekraf & Perindagkop 5. Pelaku Usaha EKRAF Kerajinan Lokal 6. Pelaku Usaha Home Industri 7. Pelaku Usaha EKRAF Kopi Papua Pegunungan 8. Pelaku Usaha EKRAF Hasil Kerajinan Seni dan Musik
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	**:**	1. Mengharmonisasikan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan antara pimpinan daerah Provinsi dan 8 Kabupaten, Pimpinan OPD, para Kabid dan pelaku usaha UMKM dan EKRAF agar bisa berkolaborasi untuk ikut terlibat dalam mempromosikan, memasarkan dan mensupport hasil produk kearifan lokal dari para pelaku usaha EKRAF OAP.

		2. Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi pelaku usaha EKRAF OAP..
Misi/Keterangan	**:**	• Kegiatan dalam rangka menyamut HUT Kemerdekaan RI Ke 81 Tahun 2026. • Meningkatkan pendapatan para pelaku usaha UMKM dan EKRAF. • Mengurangi dampak inflasi. • Memperkenalkan produk-produk hasil kearifan lokal asli Kab. Jayawijaya. • Memberi kesempatan kepada para pelaku usaha yang pemula.
Hasil Kegiatan	**:**	Mendampingi, mendorong, evaluasi dan koordinasi agar kedepan para pelaku usaha EKRAF OAP dalam hal ini kelompok kopi lokal, gapoktan, home industry dan kerajinan lokal bisa lebih baik lagi dalam mengelola dan memasarkan hasil komuditi unggulan produk-produk kearifan lokal khas Provinsi Papua Pegunungan.
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	**:**	1. Para pelaku usaha EKRAF akan dibina dan selalu dilibatkan disetiap event-event penting baiknasional maupun internasional agar produk-produk khas kearifan lokal bisa terangkat dan menjadi icon/brand daerah. 2. Mendorong ke masing-masing dinas Parekraf di 8 Kabupaten agar bisa kerjasama, mengkoordinasikan, melaporkan dan mengevaluasi dengan para pelaku usaha EKRAF OAP agar kedepan bisa berjalan dengan lebih baik.
Dokumentasi Kegiatan	**:**	 

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	**:**	Festival Budaya Lembah Baliem ke 34 di Walesi Bersama Menteri Koperasi, Wamen Pariwisata dan Para Pelaku Usaha UMKM/EKRAF Tahun 2026.
Pelaksanaan Kegiatan **(Waktu & Lokasi)**	**:**	Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan Festival Walesi Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 07 & 08 Agustus 2026.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	**:**	Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut : 1. Untuk mempromosikan hasil produk-produk kearian lokal daerah Provinsi Papua Pegunungan ke kancah nasional. 2. Untuk membantu para pelaku usaha EKRAF OAP agar hasil produknya bisa menembus pasar dan bisa bersaing di pasar nasional. 3. Untuk menciptakandan melatih daya saing bagi para pelaku EKRAF OAP serta meningktakan ekonomi masyarakat dengan memberi kesempatan bagi para pelaku usaha EKRAF OAP untuk bekerjasama internal dan eksternal dari hasil produk usahanya. 4. Untuk bekerjasama dan menjalin houngan bisnis dengan Daerah/Provinsi lain untuk barter hasil komuditi yang dibutuhkan dari masing-masing Daerah/Provinsi.
Peserta Kegiatan	**:**	Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu ; 1. Gubernur & Para Pejabat Kepala Forkopimda Provinsi Papua Pegunungan. 2. Bupati dan Pejabat Kepala Forkopimda Kab. Jayawijaya 3. Menteri Koperasi 4. Wamen Pariwisata 5. Wisatawan Lokal & Mancanegara 6. Para Pelaku Usaha UMKM 7. Pelaku Usaha EKRAF

		8. Seniman 9. Tamu undangan dan masyarakat umum
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	**:**	1. Mengharmonisasikan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan antara pimpinan daerah Provinsi dan 8 Kabupaten, Pimpinan OPD, Para Kabid dan Pelaku usaha UMKM dan EKRAF agar bisa berkolaborasi untuk ikut terlibat dalam mempromosikan, memasarkan dan mensupport hasil produk kearifan lokal dari para pelaku usaha EKRAF OAP. 2. Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi pelaku usaha EKRAF OAP.
Misi/Keterangan	**:**	• Kegiatan dalam rangka menyamut HUT Kemerdekaan RI Ke 81 Tahun 2026. • Meningkatkan pendapatan para pelaku usaha UMKM dan EKRAF. • Memperkenalkan seni, budaya dan hasil-hasil produk UMKM dan EKRAF kepada wisatawan nasional luar Wamena dan wisatawan Manca negara. • Mengurani dampak inflasi. • Memperkenalkan produk-produk hasil kearifan lokal asli Kab. Jayawijaya. • Memberi kesempatan kepada para pelaku usaha yang pemula
Hasil Kegiatan	**:**	Mendampingi, mendorong, evaluasi dan koordinasi agar kedepan para pelaku usaha EKRAF OAP dalam hal ini kelompok kopi lokal, Gapoktan, Home industry dan kerajinan lokal bisa lebih baik lagi dalam mengelola dan memasarkan hasil komuditi unggulan produk-produk kearifan lokal khas Provinsi Papua Pegunungan.
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	**:**	1. Para pelaku usaha EKRAF akan dibina dan selalu dilibatkan disetiap event-event penting baiknasional maupun internasional agar produk-produk khas kearifan lokal bisa terangkat dan menjadi icon/brand daerah. 2. Mendorong ke masing-masing dinas Parekraf di 8 Kabupaten agar bisa kerjasama, mengkoordinasikan,

		melaporkan dan mengevaluasi dengan para pelaku usaha EKRAF OAP agar kedepan bisa berjalan dengan lebih baik.
Dokumentasi Kegiatan	**:**	

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	**:**	Pameran Pembangunan, Lomba Pidato, Fashion dan Cerdas Cermat Provinsi Papua Pegunungan.
Pelaksanaan Kegiatan **(Waktu & Lokasi)**	**:**	Kegiatan ini dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 12 S/d 14 Agustus 2026.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	**:**	Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam mengenal serta mendukung berbagai program dan hasil Pembangunan di Prov. Papua Pegunungan. 2. Untuk mepromosikan potensi dan capaian Pembangunan daerah, termasik produk unggulan, kreativitas, budaya, serta potensi ekonomi masyarakat di Prov. Papua Pegunungan. 3. Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan generasi muda mengenai Pembangunan, pemerintahan, budaya, Sejarah, serta potensi daerah melalui kegiatan cerdas cermat. 4. Untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri generasi muda

		5. Untuk mendorong kreativitas dan apresiasi terhadap budaya serta kearifan lokal. 6. Unutk menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat, kreativitas, dan kebersamaan. 7. Untuk menjadi sarana edukasi, promosi dan hiburan bagi masyarakat.
Peserta Kegiatan	**:**	Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu 1. Gubernur & Wakil Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Kepala Forkopimda Lingkungan Prov. Papua Pegunungan 4. Pelaku Usaha UMKM 5. Pelaku Usaha EKRAF 6. Seniman 7. Fashion Model 8. Pelajar & Tamu undangan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	**:**	Mengharmonisasikan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda.
Misi/Keterangan	**:**	Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkenalkan capaian Pembangunan, potensi daerah, budaya, dan kreativitas masyarakat. Kegiatan ini menjadi wadah edukasi dan pengembangan bakat, khususnya bagigenerasi muda, serta mendorong tumbuhnya rasa bangga terhadap identitas dan potensi Prov. Papua Pegunungan.
Hasil Kegiatan	**:**	1. Terlaksananya kegiatan pameran pembangunan sebagai sarana penyampaian informasi mengenai program, capaian, dan potensi pembangunan kepada masyarakat. 2. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai berbagai program pembangunan serta potensi unggulan yang dimiliki Prov. Papua Pegunungan.

		3. Tersalurnya bakat dan kreativitas peserta melalui lomba pidato, fashion dan cerdas cermat. 4. Meningkatnya kepercayaan diri dan kemampuan peserta dalam berkomunikasi, berkreasi, berfikir cepat, serta berkompetisi secara sehat. 5. Terpromosikannya budaya, kearifan lokal, dan indentitas daerah. 6. Terbangunnya semangat kebersamaan dan partisipasi masyarakat. 7. Terjalinnya koordinasi dan kerja sama yang baik antara panitia, peserta, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait selama pelaksanaan kegiatan. 8. Terdokumentasinya pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	**:**	1. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara menyeluruh. 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan. 3. Melanjutkan kegiatan pameran pembangunan secara berkala. 4. Mengembangkan kegiatan lomba pidato dan cerdas cermat. 5. Mendorong pengembangan fashion berbasis budaya lokal. 6. Memberikan pembinaan dan pendampingan kepada peserta berprestasi. 7. Meningkatkan keterlibatan perangkat daerah, sekolah, komunitas, pelaku UMKM, dan masyarakat. 8. Menjadikan hasil dan evaluasi kegiatan sebagai bahan perencanaan.

Dokumentasi Kegiatan	**:**	 

Kegiatan 5		
Nama Kegiatan	:	Penyampaian Materi dan Pendampingan Para Peserta Binaan Pelaku Usaha Pada Kegiatan Balai Latihan Kerja Kaomunitas di Yayasan Shakina Papua Wamena.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Yayasan Shakina Papua pada tanggal 20 S/d 22 Agustus 2026
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut : a. Untuk melatih para peserta didik agar bisa mengolah hasil produk-produk kearifan lokal hasil pertanian daerah Prov. Papua Pegunungan. b. Untuk menjalankan program strategis yang sudah disusun dan dianggarkan oleh masing-masing OPD. c. Untuk membantu dan mendidik para peserta didik agar hasil produk bisa menembus pasar dan bisa bersaing di pasar pelaku usaha non OAP. d. Untuk menciptakan dan melatih daya saing bagi para peserta didik calon pelaku usaha OAP serta meingkatkan ekonomi masyaakat dengan nantinya memberi kesempatan bagi para pelaku usaha UMKM/EKRAF OAP untuk lebih mandiri.
Peserta Kegiatan	:	Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu : 1. Kadis Parekraf Prov. Papua Pegunungan 2. Kadis Perindag Kab. Jayawijaya 3. Tamu undangan dan Para Peserta Latihan

Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	1. Mengharmonisasikan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan antara dinas instansi terkait dengan Yayasan shakina agar pendidikan kepelatihan bagi para calon pelaku usaha OAP tetap berjalan dengan baik. 2. Berkolaborasi antara pemerintah, pihak Yayasan dan pelaku usaha UMKM/EKRAF untuk ikut terlibat dalam mempromosikan, memasarkan dan mensupport hasil produk kearifan lokal dari para pelaku usaha EKRAF OAP dimaksud. 3. Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi pelaku usaha UMKM/EKRAF OAP bagi pemerintah daerah.
Misi/Keterangan	:	➢ Kegiatan balai latihan komunitas bagi calon pelaku usaha UMKM/EKRAF OAP harus menjadi program prioritas pemerintah daerah. ➢ Memberi kesempatan dan peluang baru bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dengan menjadi pelaku usaha UMKM dan EKRAF. ➢ Mengurangi dampak inflasi ➢ Memperkenalkan produk-produk hasil kearifan lokal asli Kab. Jayawijaya dan Prov. Papua Pegunungan pada umumnya. ➢ Memberi kesempatan kepada para pelaku usaha yang pemula.
Hasil Kegiatan	:	Mendampingi, mendorong, evaluasi dan koordinasi agar kedepan para pelaku usaha UMKM/EKRAF OAP dalam hal ini para peserta didik agar kedepan bisa lebih baik lagi dalam mengelola dan memasarkan hasil produk unggulan selama mengikuti pelatihan dengan produk-produk kearifan lokal khas Prov. Papua Pegunungan.
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	:	1. Melakukan pendampingan secara berkala kepada peserta binaan untuk memantau perkembangan usaha dan memberikan Solusi terhadap kendala yang dihadapi. 2. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan peserta melalui pelatihan lanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan bidang usaha masing-masing. 3. Mendorong peserta menerapkan pegetahuan yang telah diperoleh, khususnya dalam pengelolaan usaha, pencatatan keungan, produksi, pengemasan, dan pemasaran. 4. Memberikan pendampingan dalam pengembangan dan pemasaran produk, teramsuk pemanfaatan media social dan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar. 5. Mendorong peningkatan kualitas dan inovasi produk

Dokumentasi Kegiatan	:	    

Kegiatan 6		
Nama Kegiatan	:	Rapat dan Koordinasi Pembentukan Koperasi Tambang KPKSP (Koperasi Produsen Kumoki Sejahtera Papua) di Kabupaten Yahukimo.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor BP3OKP pada tanggal 10 dan 13 Agustus 2026.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Untuk melatih para anggota koperasi agar bisa memanfaatkan SDAt erutama tambang emasdan perak yang sudah tersedia di wilayah yang sudah ditetapkan. 2. Untuk membantu dan mendidik para anggota koperasi agar hasil olahan tambang tradisional produk bisa menembus pasar dan dapat bersaing di pasar luar. 3. Untuk menciptakan lapangan kerja baru terutama anggota koperasi itu sendiri dan melatih bekrja mandiri terutama bagi pelaku usaha OAP serta meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dengan memberi kesempatan bagi anggota koperasi OAP untuk lebih mandiri.
Peserta Kegiatan	:	Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara Koperasi
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	1. Mengharmonisasikan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan antara dinas instansi terkait dengan koperasi agar pendampingan, legalitas, pendidikan kepelatihan bagi para anggota koperasi OAP tetap berjalan dengan baik. 2. Berkolaborasi antara pemerintah, pihak koperasi KPSKP dan rekanan untuk ikut terlibat dalam mempromosikan, memasarkan dan mensupport hasil pengolahan tambang produk emas/perak dari para pelaku usaha OAP dimaksud. 3. Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi pelaku usaha tambang tradisional OAP dan PAD bagi pemerintah daerah.

Misi/Keterangan	:	• Kegiatankoperasi dan pemanfaatan pengolahan SDA hasil tambang harus tetap sesuai aturan dan UU pemerintah yang ada. • Pelatihan bagi anggota koperasi di balai Latihan bagi penambang OAP harus menjadi program prioritas pemerintah daerah. • Memberi kesempatan dan peluang baru bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dengan menjadi pelaku usaha tambang yang mandiri. • Mengurangi dampak inflasi. • Memperkenalkan produk-produk hasil tambang emas dan perak sebagai produk kearifan lokal asli Kab. Yahukimo dan Prov. Papua Pegunungan pada umumnya. • Memberi kesempatan kepada para pelaku usaha penambang yang pemula.
Hasil Kegiatan	:	Mendampingi, mendorong, evaluasi dan koordinasi agar kedepan koperasi dan para anggota koperasi OAP dalam hal ini agar kedepan bisa lebih baik lagi dalam mengelola dan memasarkan hasil produk tambang unggulan sesuai dengan aturan dan contoh pasaran yang ada.
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	:	1. Para pengurus koperasi dan anggota koperasi akan dibina dalam pengolahan, pemasaran, management tambang tradisional dan selalu dilibatkan disetiap event-event penting baik pameran maupun festival agar produk-produk khas kearifan lokal bisa terangkat dan bisa menjadi icon/brand daerah. 2. Mendorong ke masing-masing dinas perindag, koperasi dan UKM, Parekraf di 8 Kabupaten agar bisa kerjasama, mengkoordinasikan, melaporkan dan mengevaluasi dengan para pengurus koperasi dan anggota OAP agar kedepan bisa berjalan dengan lebih baik.
Dokumentasi Kegiatan	:	  

Kegiatan 7		
Nama Kegiatan	:	Menghadiri Upacara Kenaikan Bendera, Penurunan Bendera, Pemberian Remisi Para Narapidana dan Resepsi Malam Kenegaraan dalam Rangka Memperingati HUT RI yang Ke 81 Tahun 2026.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan ini dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Kab. Jayawijaya, Stadion Pendidikan Ekinia Itlai, Gedung Sasana Wio Kantor Bupati Jayawijaya, Aula Kantor Lapas Kelas 2B Wamena pada tanggal 17 Agustus 2026.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut : 1. Untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan pejuang kemerdekaan RI. 2. Untuk memberi contoh kepada generasi muda agar nilai-nilai kepahlawanan bisa terwujud sampai generasi yang akan datang.
Peserta Kegiatan	:	Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu ;
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	1. Mengharmonisasikan, mengkoordinasikan dan mensinkronkan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten agar kegiatan upacara kemerdekaan RI setiap tahun harus diperingati dengan penuh khikmad. 2. Berkolaborasi antara pemerintah daerah, TNI/POLRI, Veteran Pejuang, Forkopimda, Toga, Todat dan Masyarakat luas untuk ikut terlibat dalam merayakan kemerdekaan RI yang ke 81. 3. Meningkatkan dan menciptakan jiwa patriotisme bagi generasi muda dan masyarakat pada umunya.
Misi/Keterangan	:	• Kegiatan HUT Kemerdekaan RI setiap tahun pemerintah hatus bisa melaksanakan dengan baik, nyaman dan aman. • Persiapan, kesempatan dan pelatihan bagi petugas upacara harus diberikan kepada generasi muda yang talenta dan berkepribadian jiwa nasionalisme yang tinggi • Memberikan kesempatan kepada masyarakat luas akan bisa ikut memeriahkan dan mengikuti perayaan HUT RI setiap tahun dengan jiwa yang khidmat. • Memperkenalkan dan mensosialisasikan jiwa nasionalisme, patriotisme dan cara menghargai jasa para pejuang pahlawan kemerdekaan kepada generasi muda dan masyarakat luas pada umumnya.
Hasil Kegiatan	:	Mendampingi, mendorong, evaluasi dan koordinasi kepada pemerintah agar kedepan pelaksanaan menyambut perayaan hari HUT Kemerdekaan RI agar lebih baik dan lebih banyak melibatkan unsur elemen masyarakat luas.
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	:	1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten setiap tahun harus saling koordiansi dan kolaborasi untuk mensukseskan perayaan HUT RI. 2. Mendorong ke pemerintah 8 kabupaten agar bisa kerjasama, mengkoordinasikan, melaporkan dan mengevaluasi dalam pelaksanaan perayaan HUT RI

		berjalan dengan baik dan bisa diikuti seluruh lapisan masyarakat.
Dokumentasi Kegiatan	:	   

2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan

Paul Wetipo, S.Pd., Yaberius Kogoya,S.IP.

1. Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Papua Pegunungan

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Menghadiri Pembukaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Tahun Akademik 2026/2027.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 11 Agustus 2026, bertempat di Universitas Amal Ilmiah (UNA'IM) Yapis Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pembukaan PKKMB mengusung tema “Berkarya dengan Integritas, Berprestasi dengan Dedikasi”
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Mendukung pelaksanaan PKKMB sebagai bagian dari proses pembentukan karakter, pengenalan budaya akademik, serta penguatan integritas dan dedikasi mahasiswa baru sebagai generasi penerus pembangunan Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	Pimpinan UNA'IM Yapis Wamena, pimpinan Yayasan, dekan, dosen, tenaga kependidikan, panitia PKKMB, mahasiswa baru, tamu undangan, serta Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan, **Yaberius Kogoya, S.IP**
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Menghadiri pembukaan PKKMB, melakukan koordinasi dengan pihak UNA'IM Yapis Wamena, serta mendukung upaya pembentukan generasi muda yang sehat, berintegritas, berkarakter, dan memiliki kepedulian terhadap pembangunan daerah.
Misi/Keterangan	:	Kehadiran Pokja Papua Sehat merupakan bentuk dukungan terhadap pembangunan sumber daya manusia Papua Pegunungan melalui pendidikan tinggi.
Hasil Kegiatan	:	Kegiatan pembukaan PKKMB berjalan dengan baik dan mendapat antusiasme dari mahasiswa baru. Terbangun komunikasi dan sinergi antara Pokja Papua Sehat BPP dan UNA'IM Yapis Wamena dalam mendukung peningkatan kualitas generasi muda Papua Pegunungan. Kegiatan ini juga memperkuat komitmen bersama untuk membentuk mahasiswa yang sehat, berintegritas, berprestasi, dan memiliki dedikasi dalam memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pembangunan Papua Pegunungan.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara Pokja Papua Sehat BPP dan UNA'IM Yapis Wamena melalui kegiatan edukasi dan promosi kesehatan mahasiswa, pembinaan karakter, serta program pengembangan sumber daya manusia yang mendukung terwujudnya generasi muda Papua Pegunungan yang sehat dan berkualitas.

Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Mengikuti Pelantikan Pengurus DPD I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua Pegunungan Periode 2026–2029.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan dilaksanakan pada 14 Agustus 2026, bertempat di Aula Gedung Bazda Baiturrahman, Wamena, Provinsi Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Menghadiri pelantikan sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan organisasi kepemudaan di Provinsi Papua Pegunungan serta membangun sinergi antara KNPI, pemerintah daerah, BPP, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong peran pemuda dalam pembangunan daerah.
Peserta Kegiatan	:	Kegiatan dihadiri oleh Pengurus DPP KNPI, Pengurus DPD I KNPI Provinsi Papua Pegunungan, DPD II KNPI kabupaten, organisasi kepemudaan, kelompok Cipayung, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta para undangan dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan, **Yeberius Kogoya, S.IP.,** serta Pokja Papua Polhukam BPP Provinsi Papua Pegunungan.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Menghadiri dan mengikuti rangkaian pelantikan, melakukan koordinasi dengan pengurus KNPI, serta membangun komunikasi dan sinergitas dalam mendukung penguatan kapasitas dan peran pemuda sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan Papua Pegunungan.
Misi/Keterangan	:	Kegiatan pelantikan menjadi momentum penguatan persatuan dan konsolidasi pemuda Papua Pegunungan. Hal ini sejalan dengan tema “Pemuda Pegunungan Bersatu, Bangkit dan Maju” serta harapan agar KNPI menjadi wadah pembelajaran kepemimpinan dan penggerak partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah.
Hasil Kegiatan	:	Pelantikan DPD I KNPI Provinsi Papua Pegunungan berlangsung dengan baik dan menjadi momentum terbentuknya kepengurusan definitif periode 2026–2029. Kegiatan memperkuat komunikasi dan sinergitas antarelemen kepemudaan serta membuka ruang kolaborasi

		dalam mendorong pemuda menjadi pelopor perubahan dan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan Papua Pegunungan.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan DPD I KNPI Papua Pegunungan dalam penguatan kapasitas pemuda, pendidikan kepemimpinan, pemberdayaan generasi muda, serta mendorong keterlibatan pemuda dalam program pembangunan Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan pada Kegiatan Pameran Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan dilaksanakan pada 16 Agustus 2026, bertempat di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Gedung Otonomi, Wamena.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Melakukan koordinasi dan membangun sinergitas dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan serta memperoleh informasi mengenai capaian dan pelaksanaan program pembangunan bidang pendidikan sebagai bahan dukungan terhadap peningkatan kualitas SDM Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan diwakili Kepala Bidang beserta staf, Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan, **Yaberius Kogoya, S.IP**
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan jajaran, mengamati serta memperoleh informasi mengenai capaian kinerja bidang pendidikan yang dipamerkan, dan menghimpun masukan terkait program pendidikan sebagai bahan koordinasi Pokja Papua Cerdas BPP.
Misi/Keterangan	:	Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pokja Papua Cerdas BPP dalam memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, khususnya sektor pendidikan, guna mendukung peningkatan kualitas SDM serta memastikan program pembangunan pendidikan dapat berjalan secara efektif dan sesuai kebutuhan daerah.

Hasil Kegiatan	:	Terjalin koordinasi dan komunikasi antara Pokja Papua Cerdas BPP dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan. Pokja memperoleh informasi mengenai capaian dan program kerja pemerintah daerah bidang pendidikan serta berbagai upaya peningkatan kualitas SDM di Papua Pegunungan. Informasi tersebut menjadi bahan masukan untuk memperkuat sinergi dan dukungan terhadap pembangunan pendidikan di daerah.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan serta mendorong kolaborasi dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dan kualitas SDM Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Pokja Papua Cerdas dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan dalam Penguatan Tata Kelola Data, Pemerataan Beasiswa, dan Akses Pendidikan Mahasiswa
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2026, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Memperkuat koordinasi terkait pemutakhiran data mahasiswa dari 8 kabupaten, pelaksanaan program sekolah afirmasi pemerintah pusat, serta pemerataan dan percepatan penyaluran beasiswa mahasiswa.
Peserta Kegiatan	:	Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili Kepala Bidang dan Pokja Papua Cerdas, **Yaberius Kogoya, S.IP.**
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Melakukan koordinasi, klarifikasi data mahasiswa, membahas pelaksanaan sekolah afirmasi, serta mengidentifikasi kendala pembayaran dan penerimaan beasiswa mahasiswa.
Misi/Keterangan	:	Mendukung terwujudnya kebijakan pendidikan yang berbasis data, tepat sasaran, dan berkeadilan bagi mahasiswa Papua Pegunungan, baik yang kuliah di dalam maupun di luar provinsi.

Hasil Kegiatan	:	Koordinasi menghasilkan kesepahaman mengenai pentingnya pemutakhiran dan validasi data mahasiswa dari 8 kabupaten sebagai dasar penetapan kebijakan dan penyaluran beasiswa yang tepat sasaran. Dari 800 mahasiswa yang menjadi sasaran beasiswa, sekitar 300 mahasiswa telah melakukan pembayaran, sedangkan 500 mahasiswa belum, sehingga diperlukan verifikasi terhadap status dan kendala administrasinya. Selain itu, disepakati perlunya pendataan ulang mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi di ibu kota Provinsi Papua Pegunungan, agar mereka tidak terlewat dalam kebijakan bantuan pendidikan. Koordinasi juga menegaskan perlunya penguatan pelaksanaan program sekolah afirmasi serta sinergi antara Dinas Pendidikan, perguruan tinggi, dan Pokja Papua Cerdas dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat Papua Pegunungan.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	• Dinas Pendidikan bersama Pokja Papua Cerdas perlu melakukan verifikasi dan validasi 100% data mahasiswa dari 8 kabupaten, termasuk menindaklanjuti status 500 mahasiswa yang belum menerima pembayaran beasiswa. • Melakukan pendataan mahasiswa pada seluruh perguruan tinggi di ibu kota Provinsi Papua Pegunungan dan penyusunan basis data bersama yang diperbarui setiap semester. • Melaksanakan Evaluasi dan monitoring untuk memastikan realisasi beasiswa, pelaksanaan sekolah afirmasi, dan pemerataan akses pendidikan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 5		
Nama Kegiatan	:	Mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KONI di Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2026 **di** Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, diselenggarakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Pegunungan.

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Kegiatan dilaksanakan untuk memperkuat sinergitas dan koordinasi antarorganisasi olahraga di Provinsi Papua Pegunungan, mengevaluasi pelaksanaan program olahraga, serta menyusun dan menyepakati program kerja yang lebih terarah, efektif, dan optimal dalam rangka meningkatkan pembinaan serta prestasi olahraga di Provinsi Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	Peserta terdiri atas unsur KONI Provinsi Papua Pegunungan, pengurus cabang olahraga, organisasi olahraga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan juga diikuti oleh perwakilan Pokja Papua Cerdas, **Yaberius Kogoya, S.IP**, dan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan sebagai bagian dari upaya membangun sinergi dalam pengembangan sumber daya manusia dan prestasi olahraga.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Melakukan koordinasi dan membangun sinergitas dengan pengurus serta organisasi olahraga, serta menghimpun informasi terkait program pembinaan dan pengembangan olahraga di Provinsi Papua Pegunungan.
Misi/Keterangan	:	Mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan olahraga, pembinaan generasi muda, serta penguatan prestasi olahraga daerah. Sinergitas antara KONI, pemerintah daerah, organisasi olahraga, dan pemangku kepentingan diharapkan dapat menciptakan sistem pembinaan olahraga yang berkelanjutan dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi dari Provinsi Papua Pegunungan.
Hasil Kegiatan	:	Pelaksanaan Rakernas KONI menghasilkan penguatan koordinasi dan sinergitas antara KONI dengan berbagai organisasi olahraga dan pemangku kepentingan di Provinsi Papua Pegunungan. Kegiatan juga memberikan gambaran mengenai arah pengembangan dan pembinaan olahraga ke depan, termasuk pentingnya penyusunan program kerja yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Bagi Pokja Papua Cerdas BPP, hasil kegiatan menjadi bahan untuk memperkuat koordinasi dan merumuskan dukungan terhadap pengembangan potensi generasi muda melalui bidang olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia di Papua Pegunungan.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	Memperkuat koordinasi antara KONI, pemerintah daerah, organisasi olahraga, dan Pokja Papua Cerdas dalam penyusunan serta pelaksanaan program pembinaan atlet secara terarah dan berkelanjutan, termasuk pemetaan potensi atlet dan peningkatan dukungan terhadap pengembangan olahraga di Provinsi Papua Pegunungan.

Dokumentasi Kegiatan	:	

2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan

Gaad Piranid Tabuni, SP.,M.M., Oliphina Rumbekwan,S.KM., M.Kes., Nizmawati Abd Rahim,SKM.,MKM

Laporan Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi BPP Provinsi Papua Pegunungan Pokja Papua Sehat dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka percepatan pembangunan kesehatan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan 07 Agustus 2026 09.00 - selesai
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Memperkuat sinergi antara BPP dan Dinas Kesehatan dalam percepatan pembangunan kesehatan, optimalisasi Dana Otsus, peningkatan pelayanan kesehatan, serta pemenuhan SDM dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat OAP.
Peserta Kegiatan	:	A. BPP Provinsi Papua Pegunungan Pokja Papua Sehat 1. Gaad Piranid Tabuni, S.P., MM 2. Oliphina Rumbekwan, S.KM., M.Kes 3. Nizmawati Abd Rahim, SKM., MKM B. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan: 1. Sekretaris 2. Kabid Yankes 3. Kabid SDK, 4. Kabid P2P 5. Kabid Faskes dan Peningkatan Mutu 6. Kabid Kesmas.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Melakukan koordinasi, identifikasi permasalahan, serta merumuskan dukungan strategis terhadap program kesehatan prioritas di Papua Pegunungan
Misi/Keterangan	:	BPP mendorong percepatan pembangunan kesehatan melalui penguatan tata kelola Dana Otsus, peningkatan akses layanan kesehatan, dan keberpihakan program kepada OAP.
Hasil Kegiatan	:	A. Uraian Pembahasan 1. Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa Dana Otsus kesehatan sekitar 63% diperuntukkan khusus bagi OAP sesuai juknis. Masih terdapat tantangan berupa keterbatasan fasilitas kesehatan, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan. 2. Dinas Kesehatan mendorong penguatan Integrasi Layanan Primer (ILP) di 8 kabupaten, pemenuhan tenaga kesehatan, penanganan HIV/AIDS, malaria, TBC, kusta, serta percepatan penurunan stunting. 3. Terdapat sekitar 476 tenaga kontrak kesehatan OAP yang belum diangkat dan telah diusulkan ke Kementerian Kesehatan. Selain itu, telah diusulkan sekitar 430 tenaga kesehatan untuk mendukung pelayanan di 8 kabupaten. 4. Kendala lain yang ditemukan yaitu keterbatasan data

		kesehatan, pengelolaan aplikasi, kebutuhan beasiswa tenaga kesehatan, dokter spesialis, serta masalah pemusnahan makanan tambahan ibu hamil yang telah kedaluwarsa di gudang RSUD Wamena.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan 1. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan perlu menyusun Peta Jalan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Papua Pegunungan sebagai dasar distribusi tenaga kesehatan di delapan kabupaten. 2. BP3OKP mendorong percepatan tindak lanjut usulan terhadap 476 tenaga kontrak OAP agar mendapatkan kepastian status dan keberlanjutan pengabdian. 3. Dinas Kesehatan perlu memperkuat koordinasi dengan Pemerintah kabupaten perlu memastikan kesiapan: ➢ fasilitas pelayanan kesehatan; ➢ tempat tinggal tenaga kesehatan; ➢ keamanan wilayah; ➢ dukungan operasional tenaga kesehatan. 4. Dinas Kesehatan perlu memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait: ➢ program Nusantara Sehat; ➢ afirmasi tenaga kesehatan; ➢ distribusi dokter dan dokter spesialis. 5. Dinas Kesehatan perlu memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan perlu membangun sistem beasiswa tenaga kesehatan yang terintegrasi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. 6. Program beasiswa perlu memperhatikan kebutuhan peserta secara menyeluruh, termasuk: ➢ biaya pendidikan; ➢ biaya hidup; ➢ tempat tinggal; ➢ kebutuhan akademik. 7. Perlu diprioritaskan pendidikan tenaga kesehatan yang masih mengalami kekurangan, yaitu: ➢ tenaga gizi; ➢ tenaga kesehatan lingkungan; ➢ tenaga farmasi; ➢ tenaga analis kesehatan; ➢ dokter spesialis. 8. BP3OKP mendorong Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait afirmasi pendidikan dokter spesialis bagi putra-putri OAP, termasuk solusi terhadap kendala batas usia. 9. Dinas Kesehatan Provinsi bersama kabupaten perlu melakukan pemetaan kebutuhan fasilitas kesehatan dan alat kesehatan secara menyeluruh. 10. Delapan kabupaten didorong untuk menyampaikan usulan

		kebutuhan alat kesehatan kepada pemerintah pusat melalui mekanisme yang tersedia. 11. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap tenaga kesehatan yang ditempatkan didukung dengan: ➢ sarana pelayanan; ➢ alat kesehatan; ➢ obat-obatan; ➢ fasilitas pendukung lainnya. 12. RSUD Wamena perlu diperkuat sebagai pusat rujukan regional Papua Pegunungan. 13. Dinas Kesehatan perlu mempercepat penerapan ILP pada seluruh Puskesmas di delapan kabupaten. 14. Setiap Puskesmas perlu dilakukan evaluasi terhadap: ➢ kesiapan tenaga; ➢ sarana prasarana; ➢ alat kesehatan; ➢ sistem pencatatan dan pelaporan. 15. BP3OKP mendorong penyusunan laporan perkembangan implementasi ILP sebagai bahan evaluasi pembangunan kesehatan. 16. Dinas Kesehatan bersama Pemerintah daerah perlu memperkuat program percepatan penurunan: ➢ Stunting; ➢ HIV/AIDS; ➢ Malaria; ➢ TBC; ➢ Kusta. 17. Dinas Kesehatan perlu menyusun strategi berbasis wilayah dengan memperhatikan karakteristik geografis dan sosial budaya masyarakat Papua Pegunungan. 18. Perlu peningkatan edukasi, pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan berkelanjutan. 19. BP3OKP mendorong koordinasi lintas sektor agar penanganan penyakit tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. 20. Dinas Kesehatan perlu membangun sistem data kesehatan yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan. 21. Perlu dilakukan penguatan kapasitas tenaga pengelola aplikasi dan sistem informasi kesehatan di provinsi dan kabupaten untuk memastikan validitas data OAP, stunting, dan sasaran pelayanan kesehatan. 22. Setiap kabupaten perlu memiliki mekanisme pembaruan dan pencadangan data secara berkala.

Dokumentasi Kegiatan	:	  

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi, Evaluasi Program Penanggulangan HIV/AIDS KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Kabupaten Jayawijaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kantor KPA Kabupaten Jayawijaya 14 Agustus 2026 09.00 - selesai
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	1. Mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jayawijaya 2. Membahas pengelolaan dan kebutuhan anggaran untuk percepatan penurunan angka HIV/AIDS 3. Mengidentifikasi kendala utama dalam penanganan pasien HIV/AIDS, khususnya pasien Loss Follow Up (LFU) atau pasien yang telah mendapatkan layanan namun berhenti menjalani pengobatan ARV 4. Memperkuat koordinasi antara KPA, Dinas Kesehatan, LSM pendamping, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya 5. Mendorong strategi pencapaian target Three Zero HIV/AIDS tahun 2030.
Peserta Kegiatan	:	A. BPP Provinsi Papua Pegunungan Pokja Papua Sehat 1. Oliphina Rumbekwan, S.KM., M.Kes 2. Nizmawati Abd Rahim, SKM., MKM B. KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Kabupaten Jayawijaya 1. Tonius Wenda (Ketua Pelaksana Harian) 2. 8 orang staf
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Melakukan koordinasi, evaluasi program, mendengarkan kondisi lapangan, serta menyusun rekomendasi penguatan layanan HIV/AIDS melalui kolaborasi KPA, pemerintah daerah, dinas kesehatan, LSM, dan masyarakat.
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	A. Uraian Pembahasan KPA Kabupaten Jayawijaya menyampaikan bahwa dana hibah HIV/AIDS sebesar Rp2 miliar tahun 2026 masih

		belum mencukupi untuk menjawab kebutuhan program. Saat ini terdapat sekitar 1.500 pasien aktif ARV dan lebih dari 4.000 pasien Loss Follow Up yang perlu dijangkau kembali. KPA telah membentuk 4 LSM lokal untuk pendampingan hingga distrik dan honai, namun membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar. B. Hasil Pembahasan Diperoleh kesepakatan bahwa penanganan HIV/AIDS membutuhkan penguatan pembiayaan, pendampingan pasien berbasis masyarakat, dukungan PMT bagi pasien, pengurangan stigma, serta peningkatan pelacakan pasien LFU agar kembali menjadi pasien aktif (On ARV). KPA juga mengusulkan penguatan pengelolaan dana hibah agar lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	A. Rekomendasi Tindak Lanjut 1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungan anggaran HIV/AIDS secara bertahap menuju kebutuhan program yang memadai. 2. Memperkuat peran LSM lokal sebagai ujung tombak penjangkauan pasien LFU hingga kampung dan honai. 3. Menyediakan PMT pasien HIV melalui puskesmas secara rutin untuk mendukung keberhasilan terapi ARV. 4. Melakukan pemeriksaan HIV bagi ibu hamil sejak pemeriksaan ANC sesuai arahan Kementerian Kesehatan agar terapi ARV dapat diberikan sedini mungkin dan mencegah penularan kepada bayi. 5. Mendorong kolaborasi pemerintah daerah, KPA, tenaga kesehatan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk menekan prevalensi HIV/AIDS. B. Kesimpulan Pertemuan menegaskan bahwa percepatan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Jayawijaya memerlukan dukungan anggaran, penguatan pendampingan pasien, peningkatan layanan kesehatan, serta kerja sama lintas sektor untuk mencapai target Three Zero HIV/AIDS 2030.

Dokumentasi Kegiatan	:	  

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaa Pembangunan Otonomi Khusus di Kabupaten Jayawijaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya Selasa, 18 Agustus 2026 11.00 - 15.00 AM
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Kegiatan dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Otsus, melihat capaian pembangunan daerah, mengidentifikasi kendala, serta memastikan program Otsus memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Peserta Kegiatan	:	A. Badan Pengarah Papua 1. Anggota Pokja Papua Sehat ➢ Gaad Piramid Tabuni, S.P., M.M ➢ Oliphina Rumbekwan, S.KM., M.Kes ➢ Nizmawati Abd Rahim, SKM., MKM 2. Anggota Pokja Papua Polhukam ➢ Dafrin Muksin, S.IP., M.IP ➢ Namantus Gwijangge, S.IP ➢ Frans Elosak 3. Anggota Pokja Papua Cerdas ➢ Yaberius Kogoya, S.IP ➢ Paul 4. Anggota Pokja Papua Kreatif ➢ Yoyo ➢ Timmi Gurik, SH., M.Th B. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya 1. Bupati Kabupaten Jayawijaya/mewakili 2. Bapedda Kabupaten Jayawijaya 3. OPD Terkait C. BPJS Kesehatan Kabupaten Jayawijaya 1. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Jayawijaya 2. 1 orang staff

Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Kegiatan dilakukan melalui pemaparan capaian pelaksanaan Otsus, diskusi lintas sektor, serta penyampaian masukan dari OPD dan pemangku kepentingan terkait pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi, administrasi kependudukan, dan pelayanan dasar.
Misi/Keterangan	:	Pelaksanaan Otsus harus menjadi instrumen percepatan pembangunan Papua yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan OAP, bukan hanya penyerapan anggaran, tetapi menghasilkan dampak pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.
Hasil Kegiatan	:	Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyampaikan bahwa dana Otsus mengalami peningkatan dan telah diarahkan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun masih terdapat tantangan berupa rendahnya capaian IPM, keterbatasan data OAP, belum adanya grand design pembangunan OAP secara spesifik, serta lemahnya koordinasi pusat dan daerah.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	Perlu penyusunan grand design pembangunan OAP, penguatan koordinasi pusat-daerah, peningkatan kapasitas pengelolaan data dan evaluasi, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta evaluasi menyeluruh pelaksanaan Otsus dengan melibatkan masyarakat OAP sebagai bagian utama pembangunan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi BP3OKP Papua Pegunungan bersama SMK Kesehatan Elisa Gobai
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	SMK Kesehatan Elisa Gobai Rabu, 19 Agustus 2026 14.00 - 15.20 AM

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Koordinasi Anggota Pokja dengan Kepala Sekola, Guru dan Siswa Siswi SMK Kesehatan Elisa Gobai
Peserta Kegiatan	:	A. BPP Provinsi Papua Pegunungan Pokja Papua Sehat 1. Gaad Piranid Tabuni, S.P., MM 2. Oliphina Rumbekwan, S.KM., M.Kes 3. Nizmawati Abd Rahim, SKM., MKM B. SMK Kesehatan Elisa Gobai Kabupaten Jayawijaya 1. Kepala Sekolah 2. Guru 3. Siswa siswi
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, Koordinasi
Misi/Keterangan	:	1. Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	Pentingnya Peran Tenaga Kesehatan dalam Membangun Kesehatan di Provinsi Papua Pegunungan A. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui penyampaian materi, diskusi, dan motivasi kepada siswa-siswi SMK Kesehatan Elisa Gobai Wamena. Materi utama yang disampaikan meliputi: Kondisi pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Pegunungan. 1. Tantangan pelayanan kesehatan di wilayah pegunungan. 2. Peran strategis tenaga kesehatan dalam pelayanan masyarakat. 3. Pentingnya profesionalisme, integritas, dan etika tenaga kesehatan. 4. Peran generasi muda dalam mendukung pembangunan kesehatan daerah. 5. Semangat pengabdian tenaga kesehatan bagi masyarakat Papua Pegunungan. Dalam kegiatan ini peserta diberikan pemahaman bahwa tenaga kesehatan bukan hanya bertugas memberikan pengobatan, tetapi juga berperan dalam pencegahan penyakit, edukasi kesehatan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta menjadi agen perubahan di lingkungan tempat bertugas. B. Hasil Kegiatan Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diperoleh beberapa hasil sebagai berikut: 1. Meningkatnya Pemahaman Siswa Tentang Peran Tenaga Kesehatan Peserta memahami bahwa profesi tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan

		Papua Pegunungan, terutama dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. 2. Meningkatnya Motivasi Belajar Siswa Siswa menunjukkan antusiasme dan motivasi untuk meningkatkan kemampuan akademik, keterampilan praktik, serta mempersiapkan diri menjadi tenaga kesehatan yang kompeten. 3. Tumbuhnya Kesadaran Pengabdian Kepada Daerah Peserta memahami bahwa tenaga kesehatan Papua Pegunungan sangat dibutuhkan untuk melayani masyarakat, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses pelayanan. 4. Terbangunnya Pemahaman Tentang Karakter Tenaga Kesehatan Peserta memahami bahwa seorang tenaga kesehatan harus memiliki: a) Kompetensi; b) Disiplin; c) Integritas; d) Kepedulian; e) Empati; f) Profesionalisme; g) Semangat pelayanan. 5. Teridentifikasinya Kebutuhan Penguatan Kapasitas Siswa Dari hasil diskusi, terdapat kebutuhan untuk memberikan pembinaan lanjutan terkait pengembangan kompetensi, wawasan profesi, dan kesiapan memasuki dunia kerja kesehatan.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, direkomendasikan beberapa langkah strategis: 1. Program Pembinaan Calon Tenaga Kesehatan Papua Pegunungan a) BP3OKP bersama pihak terkait dapat mendorong program pembinaan berkelanjutan bagi siswa sekolah kesehatan melalui: b) Motivasi profesi secara berkala; c) Penguatan karakter dan kepemimpinan; d) Pembinaan kesiapan kerja; e) Pengenalan kebutuhan tenaga kesehatan daerah. 2. Pengembangan Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan Kesehatan Perlu dibangun kerja sama antara BP3OKP, pemerintah daerah, dan sekolah kesehatan untuk: a) Meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan; b) Mendukung kegiatan praktik lapangan; c) Membuka peluang pengembangan kompetensi siswa. 3. Pendataan dan Penguatan Potensi SDM Kesehatan Muda a) Perlu dilakukan pendataan siswa dan lulusan

		sekolah kesehatan sebagai bagian dari pemetaan potensi tenaga kesehatan lokal Papua Pegunungan. 4. Pelaksanaan Sosialisasi Berkelanjutan a) Kegiatan serupa perlu dilaksanakan di sekolah-sekolah kesehatan lainnya agar semakin banyak generasi muda memahami pentingnya profesi kesehatan. 5. Mendorong Semangat Pengabdian Putra-Putri Papua a) Perlu terus ditanamkan nilai bahwa tenaga kesehatan asli Papua memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 5		
Nama Kegiatan	:	Penyerahan Satu (1) Dokumen Pertanggung jawaban Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan dana Tambahan Infrastruktur Tahun 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Rabu , 12 – 8 – 2026 Kantor BP3OKP
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	▪ Untuk menjamin Transparansi dan Akuntabilitas pegelolahan dana otsus,menyediakan bahan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan,serta memastikan pemanfaatan dana otsus. ▪ Memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,khususnya Orang Asli Papua.
Peserta Kegiatan	:	Turut menerima dokumen: • Oliphina Rumbekwan ,SKM,M,Kes (Pokja Papua sehat) • Nizmawati Abd.Rahim,SKM;M,KM (Pokja Papua Sehat)

		• Yaberius Kogoya, S.IP.(Pokja Papua Cerdas) • Namantus Ngiyangge ,S.IP.(Pokja Papua Damai)
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi ,dan Koordinasi
Misi/Keterangan	:	➢ Pokja Papua Sehat ➢ Pokja Papua cerdas ➢ Pokja Papua Produktif ➢ Pokja Papua Damai
Hasil Kegiatan	:	Penyerahan Dokumen di serahkan oleh Sekertaris Bappeda Kabupaten lanny Jaya Bapak : Robert Kamo,ST ❖ Dokumen pertanggung jawaban dana otsus telah di terima oleh BP3OKP sesuai mekanisme yang ditetapkan atau dokumen yang telah di persyaratkan. ❖ Terlaksananya verifikasi dan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan Dokumen pertanggung jawaban. ❖ Teridentifikasi Dokumen yang belum lengkap atau perlu di perbaiki,apabila masih terdapat kekurangan. ❖ Tersedianya data dan Informasi penggunaan dana Otsus sebagai bahan pemantauan ,evaluasi,dan pelaporan. ❖ Meningkatnya akuntabilitas dan Transparansi pengelolahan Dana Otsus di kabupaten kota. ❖ Terbangunnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kota dengan BP3OKP dalam pengolahan dan pertanggung jawaban Dana Otsus. Melakukan diskusi bersama Sekertaris Bappeda dan kelompok kerja (Pokja) terkait untuk memperoleh dukungan dan koordinasi dalam mengawal program Prioritas Kementrian /Lembaga yang telah disepakati dalam audiensi pada tanggal 22 juli 2026 1. Perencanaan Pembangunan Rumah sakit dari tipe D – ke tipe C,pemangkuan dari kementrian Kesehatan(diperlukan pelepasan tanah Adat,dan pengurusan sertifikat tanah) karena date line waktu sampai dengan Desember 2026. 2. Rencana pembangunan Rumah Sakit (Januari tahun 2027). 3. Persiapan pembangunan sekolah rakyat di Distrik Beam . 4. Perencanaan penyediaan satu ruang unit transfusi darah Rumah sakit (UTDRS) di Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya (

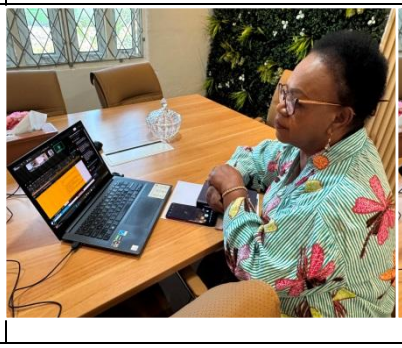
		berhubungan dengan meningkatnya angka HIV /AIDS di kabupaten Lanny jaya). 5. Pendampingan Dapur Gizi SPPG sebanyak 6 Distrik. 6. Penyediaan sumber daya manusia di Fasilitas pelayanan kesehatan dan pemenuhan sarana dan Prasarana. 7. Mendorong anak-anak asli papua (dr umum) untuk mengikuti pendidikan spesialis.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	Ketentuan dan aspek yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolahan dana OTSUS ➢ Melakukan verifikasi dan reviuw dokumen pertanggung jawaban untuk memastikan kelengkapan ,konsistensi ,penggunaan dana otsus sesuai dengan muatan perencanaan RAPP. ➢ Memastikan kesesuaian penggunaan dana Otsus dengan Dokumen perencanaan termasuk RIPP<RAPP<RKPD,APBD,,serta prioritas Daerah. ➢ Mendorong pemerintah Kabupaten /kota memperbaiki kualitas pelaporan ,terutama dengan menampilkan hubungan antara : anggaran – kegiatan – output – outcome – penerima manfaat. ➢ Memastikan program benar- benar berpihak kepada orang asli Papua, dan memberikan manfaat langsung pada sektor kesehatan ,Pendidikan,dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. ➢ Mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas Dana otsus,sehingga penggunaan dana dapat ditelusuri mulai dari perencanaan ,penganggaran ,pelaksanaan,sampai penerima manfaat. ➢ Melakukan monitoring lapangan secara selektif untuk capaian yang dilakukan baik melalui perencanaan daerah maupun bantuan kementrian dan lembaga. ➢ Membangun koordinasi berkelanjutan dengan kabupaten /kota,sehingga BP3OKP tidak hanya menerima laporan,tetapi juga membantu mengidentifikasi hambatan dan solusi perbaikan. ➢ Desk (Pendampingan perbaikkan hasil evaluasi Musrembang Otsus tahun 2026) yang telah di lakukan secara zoom untuk Propinsi Papua Pegunungan ,agar setiap kekurangan atau temuan hasil reviuw, segera dilakukan tindak lanjut perbaikan dan dilaporkan kembali kepada BP3OKP sesuai ketentuan

		➢ Membantu mengawal program – program Prioritas Pemangkuhan dari kementrian kesehatan maupun Pendidikan. Kesimpulan : Kegiatan penyerahan Dokumen penggunaan dan pertanggung jawaban dana Otonomi Khusus (OTSUS) dari pemerintah kabupaten/kota kepada BP3OKP telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan tertib administrasi ,transparansi,akuntabilitas,serta kesesuaian pemanfaatan Dana Otsus dengan ketentuan yang berlaku.
Dokumentasi Kegiatan	:	  

Kegiatan 6		
Nama Kegiatan	:	Pendampingan Perbaikan Hasil Evaluasi MUSREMBANG OTSUS TAHUN 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Daring Via Zoom Meeting Senin : Tanggal, 20 Agustus 2026 Jam : 08 .30 WIB - !7.30 WIT/ Kantor BP3OKP
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Tujuan Umum adalah : ▪ Meningkatkan kualitas hasil perencanaan pembangunan melalui pendampingan perbaikan hasil evalusi musrembang otsus tahun 2026 agar usulan program dan kegiatan pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat ,serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah di Tanah Papua, serta ketentuan pengelolahan dana otonomi khusus. Tujuan Khusus adalah : ▪ Pendampingan diarahkan untuk mengklarifikasi hasil evaluasi,memperbaiki usulan,dan memastikan keselarasan usulan daerah dengan RAPPP 2025 – 2029 guna memperkuat kualitas perencanaan dan tata lelola Otsus Papua.
Peserta Kegiatan	:	▪ Oliphina Rumbekwan ,SKM ,M,Kes.(Pokja Papua Sehat)
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, Harmonisasi,Koordinasi dan Evaluasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	**Adapun Pembahasan sebagai berikut** : ❖ Kegiatan zoom di lakukan pada hari senin,20 Agustus 2026 di ikuti sebanyak :48 Propinsi Kab/Kota.Pada saat zoom berlangsung di bagi perwilayah 6 Propinsi. ❖ Hasil Evaluasi musrembang OTSUS Tahun 2026 rata –rata Keselarasan : 57,49% ❖ Propinsi Papua pegunungan di bagi menjadi 8 Kabupaten kota dan di desk sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan. ❖ Namun masih terdapat beberapa kab.kota yang menjadi catatan karena kurang memahami proses dan output pendampingan. ❖ Dalam pembahasan terdapat beberapa sub kegiatan yang belum tercantum di dalam RAPPP 2025 – 2029. ❖ Pembahasan yang di lakukan,arahan kementrian keuangan dan komisi Pemberatasan korupsi tetap

		menekankan ,bahwa usulan yang dapat di proses lebih lanjut dalam penyusunan RAP adalah usulan yang telah mencapai keselarasan 100 persen dengan RAPPP Tahun 2025 – 2029. **Pembahasan secara khusus untuk 8 kabupaten kota sebagai berikut:** ➢ Propinsi Papua Pegunungan : Jumlah Sub Kegiatan : 163,Keselarasan dengan RAPPP 2025 – 2029 : 100% selaras dengan RAPPP.Status Berita acara kesepakatan: sudah di terima dan di tandatangani. Keterangan: Terdapat usulan sub kegiatan yang belum selaras dengan RAPPP,namun masih sesuai dengan koridor PP106/ 2021 dan PMK 33/2024 sehingga usulan tersebut akan dicatat dalam berita acara dan selanjutnya akan di bahas pada forum berikutnya evaluasi RAP. 1. Kabupaten jayawijaya: a. Jumlah sub kegiatan : 135 ,100% selaras dengan RAPPP.Status berita acara kesepakatan :sudah di terima dan di tandatangani.Terdapat usulan sub kegiatan yang belum selaras dengan RAPPP,namun masih sesuai dengan koridor PP106/2021 dan PMK 33/2024 sehingga usulan tersebut akan dicatat dalam berita acara dan selanjutnya akan dibahas pada forum berikutnya evaluasi RAP. 2. Kabupaten Pegunungan Bintang: a. Jumlah sub kegiatan: 134,100% selaras dengan RAPPP, Status berita acara kesepakatan sudah diterima dan ditandatangani.Terdapat usulan sub kegiatan yang belum selaras dengan RAPPP,namun masih sesuai dengan koridor PP 106/2021 dan PMK 33/2024 sehingga usulan tersebut akan dicatat dalam berita acara dan selanjutnya akan di bahas pada forum berikutnya evaluasi RAP. 3. Kabupaten Yahukimo : a. Jumlah sub kegiatan: 254 Kegiatan: 100% selaras dengan RAPPP,status berita acara

		kesepakatan sudah diterima dan di tandatangani.Terdapat usulan sub kegiatan yang belum selaras dengan RAPPP, namun masih sesuai dengan koridor PP106/2021 dan PMK 33/2024 sehingga usulan tersebut akan dicatat dalam berita acara dan selanjutnya akan dibahas pada forum berikutnya evaluasi RAP. 4. Kabupaten Tolikara : a. Belum di laksanakan sesuai pendampingan. 5. Kabupaten Mamberamo Tengah: a. Jumlah Sub Kegiatan : 112 Kegiatan. 100% selaras dengan RAPPP,status berita acara kesepakatan sudah diterima dan ditandatangani .Terdapat usulan sub kegiatan yang belum selaras dengan RAPPP,namun masih sesuai dengan koridor PP106/2021 dan PMK 33/2024 sehingga usulan tersebut akan dicatat dalam berita acara dan selanjutnya akan dibahas pada forum berikutnya evaluasi RAP. 6. Kabupaten Nduga : a. Belum di laksanakan sesuai pendampingan. 7. Kabupaten Yalimo : a. Jumlah sub kegiatan : 89 Kegiatan.100% selaras dengan RAPPP,status berita acara kesepakatan sudah di terima dan di tandatangani.terdapat usulan sub kegiatan yang belum selaras dengan RAPPP,namun masih sesuai dengan koridor PP106 /2021 dan PMK 33 /2024,sehingga usulan tersebut akan di catat dalam berita acara dan selanjutnya akan dibahas pada forum berikutnya evaluasi RAP. 8. Kabupaten Lanny Jaya : a. Jumlah sub kegiatan : 138 Kegiatan.100% selaras dengan RAPPP, status berita acara kesepakatan sudah diterima dan ditandatangani.Terdapat usulan sub kegiatan yang belum selaras dengan RAPPP, namum masih sesuai dengan koridor PP106/2021 dan PMK 33 /2024 ,sehingga usulan tersebut akan dicatat dalam berit acara dan selanjutnya

		akan di bahas pada forum berikutnya evaluasi RAP
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	**Sesuai dengan pendampingan perbaikan Musrembang OTSUS Tahun 2026 ,maka yang dapat di lakukan adalah**: a. Melakukan Invetarisasi hasil evaluasi terhadap dokumen usulan musrembang otsus tahun 2026 yang masih memerlukan perbaikan. b. Melakukan pendampingan kepada OPD dan pemerintah kabupaten kota dalam memperbaiki dokumen sesuai hasil evaluasi dan ketentuan yang berlaku. c. Melakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap usulan program ,kegiatan,indicator.target.lokasi,sasaran,serta kebutuhan anggaran. d. Menyeleraskan usulan musrembang Otsus ,dengan perencanaan daerah ,seperti RKPD,RENJA OPD,serta system perencanaan dan penganggaran daerah. e. Memastikan usulan sesuai dengan Prioritas Pembangunan OTSUS Papua.,terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua.s f. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan OPD terkait. g. Melakukan Finalisasi dokumen hasil perbaikan h. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala,terhadap tindak lanjut hasil pendampingan sampai seluruh perbaikan dapat di selesaikan.
Dokumentasi Kegiatan	:	 

Kegiatan 7		
Nama Kegiatan	:	Mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 81 Tahun di Kabupaten Jayawijaya.(Propinsi Papua Pegunungan).
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Upacara Bendera HUT RI ,17 Agustus 2026 Jam : 09.00 WIT - selesai Halaman Kantor Bupati Kabupaten Jayawuijaya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	**Memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia** • Menghormati dan mengenang jasa para Pahlawan • Menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air • Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa • Meningkatkan rasa disiplin ,tanggung jawab,dan kebersamaan. • Menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan. • Menanamkan nilai – nilai perjuangan ,disiplin,tanggung jawab,dan kepedulian terhadap bangsa dan Negara.
Peserta Kegiatan	:	• Oliphina Rumbekwan ,SKM,M,Kes.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi dan Harmonisasi
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Sehat
Hasil Kegiatahn	:	▪ Upacara memperingati Hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 81 Tahun, telah terlaksana dengan baik. ▪ Dihadiri oleh Bapak Bupati kabupaten jayawijaya selaku Inspektur Upacara ,juga di hadiri oleh bapak wakil Bupati Kab.jayawijaya. ▪ DPRD, seluruh OPD Terkait ,BUMN dan BUMD ,TNI ,POLRI, dan seluruhTamu undangan . ▪ Organisasi – organisasi Profesi ,wanita dan seluruh peserta upacara. ▪ Kegiatan dilakukan secara sederhana dan Hikmat, kemudian di lanjutkan dengan ramah tamah bersama seluruh tamu undangan di: Aula Bupati Kabupaten jayawijaya.
Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut	:	**Setelah pelaksanaan Upacara memperingati Kemerdekaan RI maka yang perlu dilakukan adalah**: ▪ Menjadikan nilai –nilai perjuangan para pahlawan sebagai motivasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. ▪ Meningkatkan kedisiplinan ,tanggung jawab,persatuan,dan kerjasama dilingkungan kerja

		▪ Mempertahankan semangat gotong royong serta kebersamaan dalam mendukung pembangunan daerah. ▪ Mendorong seluruh rekan –rekan untuk berperan aktif dalam mengisi kemerdekaan melalui kinerja dan pelayanan yang bekualitas.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 8		
Nama Kegiatan	:	**Pendampingan Pasien Penderta Kusta atas nama Ibu berinisial (S) dari Desa Bonom Kabupaten Lanny Jaya yang belum mendapat pengobatan MDT**
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	**Bulan Juli sampai dengan Agustus 2026** **(Tanggal : 22 Juli - 27 Agustus 2026)** **Kabupaten Lanny Jaya**
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	**Tujuan Umum :** - **Memastikan Pasien mendapatkan pengobatan secara tepat,teratur,lengkap,dan sampai selesai sehingga penyakit dapat di sembuhkan serta penularan dan kecacatan dapat di cegah.** **Tujuan Khusus :** - **Melakukan penelusuran pasien karena pasien mangkir sejak di diagnosa terjangkit penyakit kusta.**

		- **Memastikan pasien memulai pengobatan MDT sesuai klasifikasi dan regimen yang ditetapkan.** - **Memberikan edukasi dan dukungan psikososial agar pasien tidak takut,malu atau mengalami stigma dan diskriminasi** - **Mencegah penularan kusta kepada anggota keluarga dan masyarakat.**
Peserta Kegiatan	:	▪ **Oliphina Rumbekwan,SKM,M,Kes (Pokja Papua Sehat)** ▪ **KABID P2PL Propinsi Papua Pegunungan** ▪ **KABID P2PL Kabupaten Lanny Jaya** ▪ **Kasie Farmasi RSUD Kabupaten Lanny Jaya** ▪ **Penanggung Jawab Kusta RSUD Jayawijaya**
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	**Sinkronisasi ,Harmonisasi, koordinasi dan Evaluasi**
Misi/Keterangan	:	**Pokja Papua Sehat**

Hasil Kegiatan	:	Hasil Yang didapatkan ketika kunjungan BP3OKP ke Kabupaten lanny jaya pada tanggal : 21 – 7- 2026 adalah sebagai berikut: ➢ Pertemuan tanggal 21 -7-2026 bersama Bupati dan seluruh OPD terkait. ➢ Pertemuan pada tanggal 22 – 7 - 2026 bersama Kepala Dinas kesehatan lanny jaya dan Direktur Rumah sakit menyampaikan tentang situasi Dinas kesehatan dan Rumah sakit tentang capaian program dan kendala – kendala yang di hadapi serta solusi yang diambil. **PERMASALAHAN YANG DI TEMUKAN** **Gambaran Umum :** ➢ Situasi Dinkes Lanny Jaya (Bidang Penyakit Menular)/ KABID Yankes (dr .Denny Kogoya) ketika di konfirmasi pada bulan Juni 2026 di katakan bahwa beberapa tahun belakangan ini tidak terdapat adanya penyakit kusta di Kabupaten Lanny Jaya. ➢ Oleh sebab itu tidak disediakan alat/obat untuk pemeriksaan Penderita yang di diagnosa terkena Penyakit Kusta. ➢ Pada saat Audiensi Ketika kunjungan Pokja Papua sehat disampaikan oleh kabid P2PL (dr. Denny Kogoya) bahwa ada satu kasus penderita penyakit kusta yang ditemukan di Kab.Lanny jaya, pasien tersebut terdiagnosis dari Rumah sakit umum daerah Wamena . ➢ Pasien berinisial (S) perempuan ,umur dewasa dengan diagnosa kusta (Tipe MB),dari desa bonum. ➢ Jarak tempuh ke Desa bonum sekitar 3-4 jam (jalan kaki) dari kab. ➢ Telah di informasikan oleh RSUD Wamena ke Kabid P2PL Lanny jaya,namun pasien belum datang ,sudah di hubungi oleh Kabid namun belum direspon. ➢ Stok obat MDT tidak tersedia di gudang Farmasi kab.lanny jaya (karena selama ini belum ada kasus) ➢ Sekembalinya Tim BP3OKP (Pokja Papua Sehat) akan segera berkoordinasi dengan Sekertaris Dinkes Propinsi dan(BidangP2PL) bahwa ada satu (1) penderita kusta di kabupaten Lanny jaya, agar segera di tindak lanjuti untuk menerima pengobatan MDT. ➢ Kolaborasi dengan RSUD Kabupaten jayawijaya (penanggung Jawab kusta) agar dapat memberikan edukasi kepada pasien untuk segera berobat ke RSUD /Dinkes Bidang Yankes kabupaten Lanny Jaya. ➢ Memastikan bersama agar pasien dapat segera memperoleh dan menjalani pengobatan MDT. **Hasil kolaborasi antara Dinkes Propinsi Papua Pegunungan - RSUD Kabupaten Jayawijaya - Dinkes Kabupaten lanny Jaya dan RSUD Lanny jaya serta Pokja Papua Sehat , sebagai berikut:**

- Pertemuan dengan Kabid P2PL Propinsi Papua Pegunungan pada tanggal 3 Agustus 2026 ,melaporkan bahwa ada satu (1) kasus pasien dengan penyakit kusta,terdiagnosis dari Rumah Sakit umum Daerah wamena.
- Persediaan (stok obat) tidak tersedia di kabupaten Lanny jaya (Rumah sakit maupun Dinas kesehatan).
  Therapi MDT akan disiapkan oleh Dinkes Propinsi dalam Bulan Agustus ,namun untuk pengobatan berikutnya harus dilakukan secara aplikasi SITASIA oleh Dinkes kabupaten Kota (Bidang P2PL Kabupaten Lanny jaya).
- Telah dilakukan pemeriksaan untuk keluarga yang kontak serumah (mencegah terjadi penularan penyakit) dan membutuhkan penguatan dukungan keluarga guna meningkatkan keberhasilan pengobatan serta mengurangi stigma.
- Edukasi telah di lakukan secara baik kepada ibu berinisial (S) dari Desa Bonom kabupaten Lanny jaya dan keluarga sehingga akhirnya ibu saat ini telah mendapatkan pengobatan MDT di Rumah sakit Umum lanny jaya dan di pantau sekaligus oleh Kabid P2PL lanny jaya.(**Tanggal : 27 Agustus 2026**)
- **Tepatnya 1 Bulan 5 hari pendampingan dan akhirnya pasien dapat menerima Therapi/ pengobatan.**
- Membutuhkan dukungan Psikologis dari semua pihak.

BEBERAPA KENDALA YANG MASIH DITEMUKAN DALAM PELAKSANAAN PENANGANAN PENYAKIT KUSTA ANTARA LAIN

- Belum optimalnya penemuan kasus secara dini
- Kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga
- Keterbatasan tenaga kesehatan dalam melakukan pemantauan
- Adanya penderita yang sulit di hubungi
- Masih adanya stigma dan pemahaman yang kurang tepat mengenai penyakit kusta
- Kondisi geografis dan jarak menuju fasilitas pelayanan kesehatan
- Pendataan ,pencatatan dan pelaporan yang perlu terus di perbaiki dan di perbaharui.
- Jaringan /signal yang sering terganggu sehingga penggunaan aplikasi SITASIA kurang efektif.

HASIL CAKUPAN PELAYANAN PENYAKIT KUSTA di 8 (delapan) KABUPATEN /KOTA PROPINSI PAPUA PEGUNUNGAN (TAHUN 2024,2025,2026)

LAPORAN CAKUPAN TAHUN 2024

No	Kabupaten	Jumlah kasus Kusta	Puskesmas	Kasus Anak	MB	PB	Cacat TK 1	Cacat TK 2	Keterangan

1	Jayawijaya	18	5	0	15	3	0	0	
2	Pegunungan Bintang	2	2	0	2	0	0	0	
3	Yahukimo	0							Tidak ada laporan
4	Tolikara	0							Tidak ada Laporan
5	Mam Tengah	5	2	3	5	0	0	0	
6	Yalimo	0							Tidak ada
7	Lanny Jaya	0							Tidak ada laporan
8	Nduga	0							Tidak ada laporan

LAPORAN CAKUPAN TAHUN 2025

No	Kabupaten	Jumlah kasus Kusta	Puskesmas	Kasus Anak	MB	PB	Cacat TK 1	Cacat TK 2	Keterangan
1	Jayawijaya	30	5	0	21	9	4	0	
2	Pegunungan Bintang	2	2	1	2	0	0	0	
3	Yahukimo								Tidak ada laporan
4	Tolikara								Tidak ada laporan
5	Mam Tengah	5	2	3	5	0	0	0	
6	Yalimo								Tidak ada laporan
7	Lanny Jaya								Tidak ada laporan
8	Nduga								Tidak ada laporan

LAPORAN CAKUPAN TAHUN 2026

No	Kabupaten	Jumlah kasus Kusta 2026	Puskesmas	Kasus Anak	MB	PB	Cacat TK 1	Cacat TK 2	Keterangan
1	Jayawijaya	30	5	0	21	9	4	0	
2	Pegunungan	2	2	1	2	0	0	0	

:

LAPORAN CAKUPAN TAHUN 2026 (PER-SEMESTER)

No	Kabupaten	Jumlah kasus Kusta 2026	Puskesmas	Kasus Anak	MB	PB	Cacat TK 1	Cacat TK 2	Keterangan
1	Jayawijaya	30	5	0	21	9	4	0	
2	Pegunungan Bintang	2	2	1	2	0	0	0	
3	Yahukimo	2	0	0	2	0	0	0	Tidak ada laporan
4	Tolikara								Tidak ada laporan
5	Mam Tengah	5	2	3	5	0	0	0	
6	Yalimo								Tidak ada laporan
7	Lanny Jaya								Tidak ada laporan
8	Nduga								Tidak ada laporan

Sumber data : Kabid P2PL Prop.Papua Pegunungan.

CATATAN:

- Kabupaten Lanny Jaya ada satu pasien ,namun belum terbaca di aplikasi karena belum menggunakan Aplikasi SITASIA.(Sistem informasi kusta dan Frambusia).
- Kabupaten Tolikara ada 2 Pasien,namun belum terbaca karena belum menggunakan Aplikasi SITASIA.
- Sering terkendala jaringan (menjadi masalah di Papua Pegunungan)

Rekomendasi/ Rencana Tindaklanjut

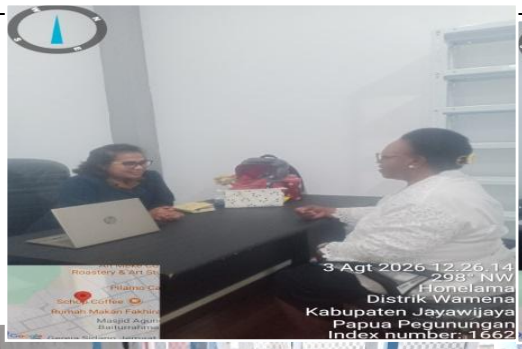
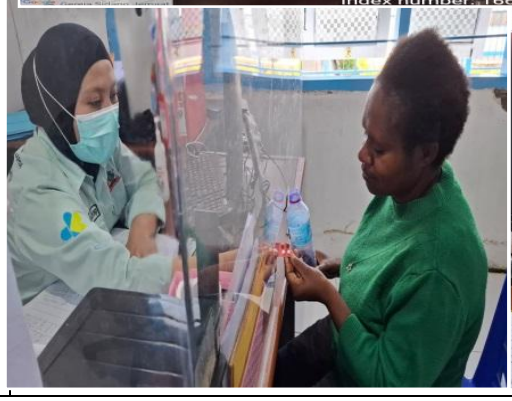
REKOMENDASI PENANGANAN PASIEN KUSTA MELALUI PENYELESAIAN PENGOBATAN MDT,PENCEGAHAN KECACATAN,PEMUTUSAN PENULARAN DAN PENGURANGAN STIGMA SEBAGAI BERIKUT:

1. Memastikan pasien mendapatkan dan minum obat MDT secara teratur sesuai klasifikasi dan lama pengobatan.
2. Melakukan penemuan kasus secara aktif,melalui pemeriksaan ke masyarakat .
3. Melakukan pemantauan kepatuhan pengobatan melalui kunjungan rumah atau pendampingan berkala bagi pasien yang berisiko putus obat.
4. Memantau efek samping obat dan tanda reaksi kusta,serta segera merujuk kefasilitas kesehatan apabila di temukan keluhan atau tanda bahaya.
5. Melakukan pemeriksaan fungsi saraf dan pencegahan kecatatan (POD) secara berkala.
6. Melibatkan keluarga dalam mengingatkan jadwal pengobatan dan memberikan dukungan kepada pasien.
7. Melakukan pemeriksaan kontak serumah dan memberikan edukasi mengenai pencegahan serta tanda – tanda kusta.
8. Memberikan edukasi untuk mengurangi stigma dan diskriminasi ,sehingga pasien tidak merasa malu atau di kucilkan.
9. Dinas kesehatan dan Puskesmas perlu melakukan pemutakhiran data penderita secara berkala, sesuai ketentuan program .
10. Menjaga keberlanjutan obat program dengan terbiasa menggunakan Aplikasi SITASIA.

Tindak lanjut yang di berikan : Kepada Rumah sakit umum daerah Ianny Jaya dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ianny Jaya (Bidang P2PL) sebagai berikut:

- Menetapkan petugas / pendamping yang bertanggung jawab terhadap pasien.
- Memastikan ketersediaan MDT di Fasyankes
- Membuat jadwal kunjungan dan pemantauan pengobatan sampai pasien menyelesaikan MDT.
- Melakukan Follow up terhadap pasien yang mangkir atau terlambat mengambil obat.
- Melakukan rujukan bila terdapat reaksi berat,gangguan saraf,luka /ulkus,atau kecatatan.
- Melakukan edukasi keluarga dan pemeriksaan kontak serumah.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap kepatuhan minum obat,kondisi saraf ,dan status kecatatan.

		➢ Pendekatan secara psikologis perlu di perhatikan dan hindari stigma terhadap pasien . ➢ Pentingnya di lakukan Surveilans , agar dapat menemukan kasus –kasus baru,sehingga pengobatan dapat dilakukan secara dini dan Komperhensif. ➢ Meningkatkan pencatatan ,pelaporan,monitoring dan evaluasi kasus kusta secara berkala. ➢ Menggunakan system /aplikasi pencatatan yang di tetapkan oleh program (Aplikasi SITASIA). ➢ Bulan September pasien memasuki pengobatan ke 2. **KESIMPULAN** : Berdasarkan hasil pendampingan dan pembahasan mengenai penyakit kusta,dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kusta telah dilaksanakan melalui kegiatan penemuan kasus ,pemeriksaan dan pengobatan penderita,serta edukasi kepada pasien dan keluarga.Capaian program dalam tiga tahun terakhir oleh Dinkes Propinsi papua pegunungan menunjukkan adanya upaya yang berkelanjutan ,namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian dan penanganan secara terpadu. Oleh karena itu ,di perlukan penguatan koordinasi dengan Pemerintah daerah,Dinkes,Rumah sakit Umum ,Puskesmas,kader kesehatan,keluarga dan masyarakat .Dengan pelaksanaan rekomendasi dan rencana tindak lanjut secara konsisten dan berkesinambungan ,diharapkan penanganan penderita kusta dapat menjadi lebih efektif dalam rangka mendukung pencapaian eliminasi kusta.	

Dokumentasi Kegiatan	:	   

BAB III
PENUTUP

Penerapan Otonomi Khusus di Papua telah memasuki tahap baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan didukung oleh pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) melalui Perpres Nomor 121 Tahun 2022. Tugas utama BPP mencakup sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan di Papua. Selain berfokus pada pembangunan fisik dan kesejahteraan, BPP juga berkomitmen memastikan partisipasi aktif masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dan menjembatani kebutuhan mereka dengan kebijakan pemerintah pusat. Di bawah rencana induk yang terukur melalui Perpres Nomor 24 Tahun 2023, BPP berperan penting dalam mengarahkan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi implementasi Otsus Papua.

Dengan adanya BPP yang memiliki wewenang dan struktur yang jelas, diharapkan percepatan pembangunan di Papua dapat terlaksana sesuai dengan rencana induk yang telah disusun hingga tahun 2041. Kerjasama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat Papua sangat diperlukan agar pelaksanaan Otsus dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, serta kesetaraan bagi seluruh masyarakat Papua. Evaluasi berkala dan pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus ini untuk mewujudkan Papua yang lebih sejahtera, damai, dan produktif.

Kegiatan yang di lakukan oleh BP3OKP dalam hal ini anggota dan juga masing-masing pokja berhubungan dengan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi terutama dalam era kepemimpinan baru Gubernur dan Bupati diharapkan BP3OKP dapat mengambil peran penting dalam pembangunan di Papua Pegunungan.

Wamena, 8 September 2026
a.n. Anggota BPP Provinsi Papua
Pegunungan



GAAD PIRANID TABUNI,S.P.,M.M.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF